

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PERMENTAN
NO. 10/PERMENTAN/OT.010/4/2017 TENTANG MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN TANA TIDUNG**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

EMNAT FERHAMSYAH

NIM. 501574811

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2019

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PERMENTAN No.10 / Permentan / OT. 010/4/2017 IN REALIZING GOOD GOVERNANCE IN THE LARGE OF AGRICULTURE, FOOD AND FISHERY TANA TIDUNG REGENCY

EMNAT FERHAMSYAH
emnatferhamsyah@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

This Regulation of the Minister of Agriculture No. 10 / Permentan / OT.010 / 4/2017 has the aim of increasing the effectiveness and efficiency of the performance of the Echelon IV Work Unit in the scope of the Agriculture Service so that it supports the realization of a good governance system. The Echelon IV Work Unite in the scope of the Department of Agriculture has great responsibility in government institutions, especially in the agricultural sector, to show good or often good governance. Good governance is the concept of good governance in the use of political authority and the power to manage resources for the development of a solid and responsible society.

The formulation of the problem in this study is how the application of Permentan No. 10 / Permentan / OT.010 / 4/2017 and what the implementation of Permentan No. 10 / Permentan / OT.010 / 4/2017 can realize good governance in the Department of Agriculture, Food and Fisheries, Kab. Tana Tidung. Research location at the Office of Agriculture, Food and Fisheries, Kab. Tana Tidung. This research method uses qualitative descriptive analysis.

The results show the Application of the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia No. 10 / Permentan / OT.010 / 4/2017 to the Office of Agriculture, Food and Fisheries, Kab. Tana Tidung develops agriculture sector through agricultural system mechanism carried out by the organization especially employees in realizing good governance successfully achieved by the Office of Agriculture, Food and Fisheries, Kab. Tana Tidung.

Suggestions for this research are related to the Application of the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia No. 10 / Permentan / OT.010 / 4/2017 to the Office of Agriculture, Food and Fisheries, Kab. Tana Tidung in order to supervise and supervise the results of the employee's performance that has been determined and include evaluation or violation sanctions when the employee does not succeed in achieving the target or even deviates from the performance.

Keywords: Implementation, Government Regulation, Good Governance and Agriculture, Food and Fisheries Service of Tana Tidung Regency.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERMENTAN No.10/Permentan/OT.010/4/2017 DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANA TIDUNG

EMNAT FERHAMSYAH
emnatferhamsyah@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Permentan No 10/Permentan/OT.010/4/2017 ini memiliki tujuan meningkatkan efektivitas serta efisiensi kinerja Unite Kerja Eselon IV Lingkup Dinas Pertanian agar maksimal sehingga mendukung terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Pihak Unite Kerja Eselon IV Lingkup Dinas Pertanian memiliki tanggung jawab besar dalam institusi pemerintah khususnya sektor pertanian untuk menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik atau kerap disebut dengan *good governance*. *Good governance* adalah konsep tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan masyarakat yang solid dan bertanggung jawab.

Rumusan masalah pada penelitian ini yakni bagaimana penerapan Permentan No 10/Permentan/OT.010/4/2017 dan apakah penerapan Permentan No 10/Permentan/OT.010/4/2017 dapat mewujudkan *good governance* pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung. Lokasi penelitian di Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil menunjukkan Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung mengembangkan sektor pertanian melalui mekanisme sistem pertanian yang dilakukan oleh pihak organisasi khususnya pegawai dalam mewujudkan *good governance* berhasil dicapai oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung.

Saran penelitian ini terkait Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung agar melakukan pengawasan dan pengawasan terhadap hasil kinerja pegawai yang ditetapkan serta dicantumkan evaluasi atau sanksi pelanggaran ketika pegawai tidak berhasil mencapai target atau bahkan melenceng dari target kinerja.

Kata Kunci : Implementasi , Peraturan Pemerintah, *Good Governance* dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab.Tana Tidung.

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang Implementasi Permentan No.10/Permentan/OT.010/4/2017 Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Balai Besar Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Kab.Tana Tidung adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tarakan, 8 September 2018
Yang Menyatakan



Emnat Ferhansyah
NIM.501574811

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

**Judul TAPM : IMPLEMENTASI PERMENTAN No.10/Permentan/OT.010/4/2017
TENTANG MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA DINAS
PERTANIAN,PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANA TIDUNG**

Penyusun TAPM : Ennat Ferhansyah,SP

NIM : 501574811

Program Study : Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Sabtu 1 Desember 2018

Menyetujui:

Pembimbing II

Pembimbing I



Dr. Mustainah M.M.Si
Nip.196308311988032001



Dr. Samodra Wibawa M.Si
Nip.1650827199103001

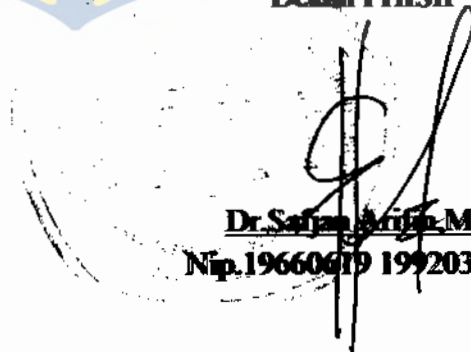
Mengetahui:

**Ketua Pascasarjana Hukum
,Sosial dan Politik**



Dr. Darmanto M.Ed
Nip.195910271986031003

Dekan FHISIP



Dr. Saifan Arifin M.Si
Nip.196606191992031002

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Emnat Ferhamsyah
NIM : **501574811**
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi PERMENTAN No. 10/Permentan/OT.010/4/2017
tentang Mewujudkan *Good Governance* pada Dinas Pertanian,
Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu / 01 Desember 2018
Waktu : 11.00 – 12.30

Dan telah dinyatakan **LULUS**

Panitia Penguji Tesis

Ketua Komisi Penguji : Dr. Milwan, S.Sos, M

Penguji Ahli : Prof. Dr. Nuziah Nurdin, S.Sos, MA

Pembimbing I : Dr. Samodra Wibawa, M.Si

Pembimbing II : Dr. Mustainah, M.M.Si

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan YME yang memiliki bumi langit dan diantaranya. Atas segala limpahan rahmat-Nya yang terus mengalir kepada seluruh umatnya, khususnya kepada penulis. Karena atas kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan thesis ini dengan waktu yang ditentukan, sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik.

Dalam penulisan tesis yang berjudul "Implementasi Permentan No.10/Permentan/OT.010/4/2017 Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Kab.Tana Tidung". Penulis menyadari bahwa Thesis ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu mengirimkan doa dan penuh kasih sayangnya, mengarahkan penulis hingga menjadi seperti saat ini, serta adik tercinta dan keluarga besar yang telah mendukung serta memberikan motivasi kepada penulis.
2. DR.H. Undunyah MH.MSi sebagai Bupati Tana Tidung yang telah mendorong dan memberikan kesempatan penulis untuk melanjutkan pendidikan
3. Markus, SE, sebagai Wakil Bupati Tana Tidung yang telah memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan thesis penelitian.
4. Dosen pembimbing yang telah banyak membantu dengan memberikan semangat, arahan dan selalu menyediakan waktunya dengan penuh kesabaran

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan mendapat balasan dari Tuhan YME.

5. Dosen penguji yang telah memberikan kritikan dan masukan untuk penulis sehingga menjadi lebih baik dalam penulisan tesis ini dan menjadikan motivasi bagi penulis untuk lebih giat belajar.

Tarakan, 8 September 2018

Emnat Ferhamsyah



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Penelitian	ii
ABSTRACT.....	iii
ABSTRAK.....	iv
Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Lembar Layak Uji	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Penelitian Terdahulu.....	12
2.2. Kajian Teori.....	16
2.2.1 Kebijakan Publik	16
2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik	21
2.2.3 Tahap Kebijakan Publik	26
2.2.4 <i>Good Governance</i>	30
2.2.5 Aspek <i>Good Governance</i>	33
2.2.6 Prinsip <i>Good Governance</i>	34
2.2.7 Kinerja Pegawai	37
2.3 Kerangka Pikir Penelitian.....	39
2.4 Operasional Konsep.....	39
2.4.1 Batasan Lingkup	37
2.4.2 Konsep	37
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Jenis Penelitian.....	42
3.2. Sumber Informasi.....	42
3.3. Prosedur Pengambilan Data.....	43
3.4. Instrumen Penelitian.....	45
3.5. Metode Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1. Profil Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	50
4.2. Profil Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	53
4.3. <i>Good Governance</i> Dinas Pertanian.....	75
4.4. Kinerja Pegawai Dinas Pertanian	88
4.5. Ringkasan Permentan No.10/Permentan/OT.010/4/ 2017.....	92

4.6.Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Permentan No.10/Permentan/OT.010/4/ 2017 dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i>	94
4.7.Saran terhadap Penerapan Permentan No.10/Permentan/OT.010/4/ 2017 dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i>	95
BAB V PENUTUP	99
5.1. Kesimpulan.....	99
5.2. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	103



DAFTAR TABEL

1.1	Data Target RENSTRA 2017.....	2
4.1	Target dan Rencana Dinas Pertanian.....	68
4.2	Realisasi Anggaran.....	77



DAFTAR GAMBAR

2.1	Model Implementasi George.....	25
2.2	Proses Kebijakan Publik.....	27
2.3	Kerangka Berpikir.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

1	Kuesioner.....	106
---	----------------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan pertanian di Indonesia dengan prinsip kemandirian dan berkelanjutan senantiasa harus diwujudkan dari waktu ke waktu, sebagai prasyarat bagi keberlanjutan eksistensi bangsa dalam mengatasi ancaman kelangkaan pangan dunia yang dampaknya semakin terlihat nyata. Upaya mewujudkan pembangunan pertanian tidak terlepas dari berbagai macam masalah yang dihadapi, masalah pertama yaitu penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian. Dari segi kualitas, faktanya lahan dan pertanian kita sudah mengalami degradasi yang luar biasa, dari sisi kesuburannya akibat dari pemakaian pupuk anorganik. Pembangunan pertanian adalah suatu bagian integral pembangunan ekonomi dan masyarakat secara umum. Secara luas pembangunan pertanian bukan hanya proses atau kegiatan menambah produksi pertanian melainkan sebuah proses yang menghasilkan perubahan sosial baik nilai, norma, perilaku, lembaga, sosial dan sebagainya demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat yang lebih baik. Pertanian merupakan sektor utama penghasil bahan-bahan makanan dan bahan-bahan industri yang dapat diolah menjadi bahan sandang, pangan, dan papan yang dapat dikonsumsi maupun diperdagangkan, maka dari itu pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan ekonomi.

Sub sektor tanaman pangan sebagai bagian dari sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam ketahanan nasional, mewujudkan ketahanan pangan, pembangunan wilayah, pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa, serta menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan untuk industri hilir yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertanian tanaman pangan sangat relevan untuk dijadikan sebagai pilar ekonomi di daerah, mengingat sumber daya ekonomi yang dimiliki setiap daerah yang siap didayagunakan untuk membangun ekonomi daerah adalah sumber daya pertanian tanaman pangan, seperti sumber daya alam (lahan, air, keragaman hayati, agro-klimat). Sumber daya manusia dibidang agribisnis, teknologi dan sebagainya. Struktur ekonomi hampir disetiap daerah, terutama diluar Pulau Jawa sebagian besar di sumbang dari sektor pertanian, khususnya tanaman pangan. Berikut rencana kinerja tahunan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Target Pencapaian Sesuai Renstra Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya kemandirian dan ketahanan pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian pada kesejahteraan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lahan sawah baru - Jumlah Pembangunan mina padi 	<ul style="list-style-type: none"> 25 Ha 3 desa
2	Meningkatnya produksi pangan memenuhi masyarakat (kemandirian pangan)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah produksi padi - Jumlah produksi jagung - Pemenuhan angka kecukupan gizi - Jumlah produksi daging ayam 	<ul style="list-style-type: none"> 2.457 Ton 53 Ton 1.878 kkal/kap/hari 85 Ton
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah produksi daging sapi/babi - Jumlah produksi telur - Jumlah produksi perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> 15 Ton 2 Ton 1.881 Ton

Sumber : Data Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa terdapat target pencapaian pada Dinas Pertanian yang didukung oleh indikator sebagai pengukur serta pengungkit keberhasilan sasaran strategis yang akan dicapai. Berikut data hasil realisasi anggaran serta program dari usaha pencapaian target tersebut

Program	Anggaran
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.299.811.800
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 242.200.000
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 100.000.000
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp. 372.650.000
5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp. 992.701.890
6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	Rp. 300.758.000
7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi	Rp. 3.805.435.000
8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Rp. 1.247.381.000
9. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian Perkebunan Lapangan	Rp. 871.460.000
10. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp. 2.707.100.000
11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp. 841.292.000
12. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	921.190.000
13. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Rp. 136.200.000

JUMLAH ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2017 : Rp. 10.607.025.000,-

Data di atas menunjukkan bahwa hasil pertanian dengan pencapaian target yang cukup besar harus didukung dengan implementasi dalam rangka pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian diartikan sebagai rangkaian berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, memantapkan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Pemerintah melaksanakan perannya sebagai stimulator dan fasilitator yang mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi dan sosial para petani agar memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya.

Proses memulihkan pertanian di Indonesia perlu peningkatan perhatian terhadap bidang pertanian yang dirumuskan dalam suatu kebijakan pembangunan negara berbasis pertanian yang strategis dan berjangka panjang dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan umum kebijakan pertanian kita adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik dan akibatnya tingkat penghidupan dan kesejahteraan petani meningkat. Proses pencapaian tujuan-tujuan ini, pemerintah baik di pusat maupun di daerah mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu; ada yang berbentuk Undang-undang, Peraturan-peraturan Pemerintah, Kepres, Kepmen, Keputusan Gubernur dan lain-lain. Salah satu peraturan yang berkaitan dengan hal ini yakni penetapan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 Tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unite Kerja Eselon IV. Peraturan ini disusun dalam rangka membantu pengembangan pertanian disamping berbagai peraturan dan strategi yang disusun oleh Pemerintah terdiri dari berbagai target yang harus dicapai tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang bekerja di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung. Jumlah pegawai keseluruhan berdasarkan data diketahui berjumlah 82 orang sedangkan secara kondisi diketahui

Kabupaten Tana Tidung sebagai salah satu kabupaten berkembang di Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu wilayah provinsi pemekaran baru.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dan RPJMD Kabupaten Tana Tidung adalah dokumen perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahunan di tingkat Nasional, Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Tana Tidung yang merupakan acuan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung dalam menyusun Renstra SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program dan kegiatan pembangunan bidang pertanian, pangan dan perikanan untuk jangka waktu 5 tahun yang akan datang. Renstra PD ini disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021. Dokumen RPJMD ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan semua dokumen operasional perencanaan pembangunan baik Renstra, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Tidung dan Rencana Kerja PD. Rencana kerja perangkat daerah dikaitkan dengan sistem kerja aparatur Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung. Penerapan strategi ini tentu berdampak pada berbagai perubahan sistem yang diterapkan guna meningkatkan pertanian di Kabupaten Tana Tidung.

Perubahan merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Dunia usaha terlebih dahulu menyadari bahwa melakukan perubahan sangat penting dan berpengaruh terhadap kualitas yang dihasilkan. Perubahan yang sangat besar sehingga pada akhirnya mempengaruhi organisasi-organisasi yang lain terpacu untuk melakukan perubahan setelah menyadari bahwa perubahan semakin cepat terjadi dan sulit untuk diprediksi keadaan yang datang. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi, karena tanpa mengikuti perubahan yang terjadi maka dapat dipastikan bahwa kelangsungan suatu organisasi tidak akan

bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi berjalan dinamis dalam menghadapi perkembangan yang terjadi dan didukung kemajuan teknologi akan meningkatkan pola perubahan organisasi menuju perkembangan yang berkualitas. Perubahan peraturan bermakna terjadinya sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Perubahan berarti pula melakukan hal-hal dengan cara baru, mengikuti jalur baru, mengadopsi teknologi baru, memasang sistem baru, mengikuti prosedur manajemen yang baru, merging, melakukan reorganisasi, atau terjadinya peristiwa yang bersifat mengganggu. Perubahan peraturan termasuk lembaga pemerintahan bisa terjadi di berbagai aspek kehidupan organisasi. Perubahan peraturan bermakna bahwa kita harus mengubah cara mengerjakan atau berpikir tentang sesuatu. Perubahan peraturan merupakan pergeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju pada keadaan yang diinginkan di masa depan. Menurut Greenberg dan Baron, perubahan tersebut merupakan perubahan peraturan pada organisasi merupakan transformasi secara terencana atau tidak terencana di dalam struktur organisasi, teknologi dan/atau orang (Williams et al, 2005). Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi, karena tanpa mengikuti perubahan yang terjadi maka dapat dipastikan bahwa kelangsungan suatu organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi berjalan dinamis dalam menghadapi perkembangan yang terjadi dan didukung kemajuan teknologi akan meningkatkan pola perubahan organisasi menuju perkembangan yang berkualitas.

Proses mengerjakan berbagai pekerjaan baru ini tentu membutuhkan adanya kesiapan organisasi (*ready to change*). Kesiapan perubahan organisasi memprioritaskan untuk menyiapkan kondisi kesiapan ketika akan mengalami sebuah perubahan guna memenuhi berbagai tuntutan maupun mengikuti situasi baru agar tidak mengalami kemunduran dan justru ditujukan untuk perkembangan di setiap periode sesuai perubahan yang dilakukan. Kesiapan perubahan terjadi pada organisasi pada umumnya didukung oleh teknologi yang baru (Sibel dan Idil, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa organisasi mampu mengidentifikasi kesiapan perubahan yang terjadi melalui

pengetahuan dalam menerapkan perubahan. Organisasi mengambil kesempatan untuk menerapkan hal baru yang didukung oleh pengetahuan serta perubahan pelaksanaan sistem organisasi (Chreim, 2003). Hasil penerapan peraturan baru merupakan dampak perbaikan atau kesiapan perubahan dengan mengkonkretkan perubahan ke arah yang lebih baik. Kesiapan perubahan organisasi disarankan untuk diimplementasikan pada tingkat yang berbeda. Pada sebagian besar proyek, disarankan bahwa rekan kerja harus melaksanakan rutinitas baru atau perubahan baru. Pada bagian teori, pemahaman kesiapan perubahan dibahas berbagi pandangan bahwa ketika pemahaman perubahan menggambarkan apa yang terjadi profesional dan mengarah ke kompetensi tinggi, konsep kesiapan perubahan juga bisa dipandang sebagai sebuah konsep pedagogis. Organisasi senantiasa melakukan kondisi untuk mengarah pada kesiapan perubahan ke arah positif dan dapat dianggap sebagai proses pembelajaran. Proses kesiapan perubahan organisasi menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek melalui evaluasi perkembangan terakhir dan ditujukan guna pencapaian lebih baik.

Pembangunan pertanian di Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan untuk mendukung pencapaian misi kedua “meningkatkan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah dan berwawasan lingkungan” dan misi kesembilan “mengembangkan agroindustri pertanian”. Pada proses ini tidak lepas dari peran perangkat daerah. Pelaksanaan berbagai target strategi dalam mencapai misi dan visi pembangunan pertanian maka perangkat daerah khususnya unit kerja eselon IV dipersiapkan agar mampu menghadapi berbagai masalah dalam menerapkan strategi pembangunan pertanian karena kesiapan dalam menghadapi perubahan merupakan sikap komprehensif dari perangkat daerah yang dipengaruhi secara simultan oleh empat elemen yaitu substansi dan arah perubahan, proses implementasi perubahan, faktor eksternal dan internal individu. Perubahan peraturan menyebabkan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan kesiapan perangkat daerah dalam membangun pertanian dalam menghadapi perubahan organisasi di

lingkungannya. Masalah yang sering muncul adalah ketidaksiapan perangkat daerah memahami arti penting melakukan perubahan khususnya penerapan strategi pembangunan pertanian. Perubahan harus diawali dengan mempersiapkan perangkat daerah untuk menerima perubahan karena pada hakekatnya manusia menjadi subyek dan obyek perubahan serta mempunyai sifat resisten terhadap perubahan. Ketidakseimbangan jumlah target pembangunan pertanian dengan jumlah ASN Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Perubahan-perubahan yang terjadi saat ini dilakukan oleh birokrasi baik di lingkungan pemerintahan berawal dari reformasi birokrasi dengan merumuskan kebijakan formal melalui penetapan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 Tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unite Kerja Eselon IV Dinas Pertanian dalam rangka meningkatkan pembangunan pertanian khususnya pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung menyusun Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tana Tidung dan bersifat indikatif yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian, pangan dan perikanan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Berbagai rencana tersebut membutuhkan standar pengukuran untuk menentukan keberhasilan dari penerapan rencana strategis salah satunya melalui penilaian didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 Tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unite Kerja Eselon IV Dinas Pertanian sudah sesuai dengan hasil kerja yang dicantumkan pada peraturan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 Tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung?
2. Apakah penerapan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 dapat mewujudkan *good governance* pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 Tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unite Kerja Eselon IV pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung.
2. Untuk menganalisis penerapan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 dalam mewujudkan *good governance* pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan hasilnya akan mampu menjelaskan penerapan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 Tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unite Kerja Eselon IV pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung.
2. Memperkuat teori sebelumnya terkait konsep implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 dalam mewujudkan *good governance* pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung.

3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat diterapkan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan atau keputusan melakukan suatu penerapan peraturan sebagai bagian dari implementasi kebijakan Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dengan mempertimbangkan budaya organisasi yang dimiliki dalam mewujudkan *good governance* dan menghadapi perubahan target kinerja akibat adanya peraturan baru.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Anita Widhy H (2012) berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang. Isu penting dalam pembangunan dewasa ini adalah pertanian berkelanjutan. Seiring dengan laju konversi lahan pertanian, sumberdaya pertanian yang perlu mendapatkan prioritas adalah lahan pertanian, terutama lahan pertanian pangan. Untuk mengendalikan konversi lahan pertanian ke non pertanian, telah diterbitkan Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta strategi pencapaiannya Tipe penelitian adalah deskriptif dengan metode gabungan (*mixed method*). Adapun variabel dan indikator dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi sosialisasi, petugas, dana, respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan, peraturan pendukung, SOP, koordinasi antar instansi, tingkat pendidikan, usia, kepemilikan lahan, persepsi masyarakat dan komitmen pelaksana. Obyek penelitian adalah para pemilik lahan pertanian baik yang telah melakukan konversi lahan maupun yang belum melakukan konversi dan anggota IPPT sebagai pelaksana kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 di Kabupaten Magelang sampai pada tahap identifikasi lokasi. Hal ini menyebabkan variabel dan indikator penelitian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Berdasarkan analisis AHP menunjukkan bahwa aspek ekologi dan alternatif konservasi tanah dan air menempati prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa

perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sangat berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Dampak dari kerusakan tanah tidak secara langsung berpengaruh pada hasil produksi pertanian, tetapi tanpa adanya upaya konservasi, produktivitas lahan pertanian yang tinggi dan usaha pertanian tidak akan berkelanjutan. Dengan kondisi lingkungan dewasa ini, sistem pertanian konservasi dianggap tepat untuk pemulihan dan kelestarian lingkungan.

2. Penelitian ketiga Dewa Ketut SS (2011) berjudul *Membangun Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Untuk Mengentaskan Petani Dari Kemiskinan*. Setelah lebih dari 60 tahun merdeka, Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi sendiri sehingga masih bergantung pada impor. Untuk keluar dari ketergantungan pada pangan impor, Indonesia harus membangun kedaulatan pangan. Ketergantungan pada pangan impor, terutama beras, akan membahayakan ketahanan pangan nasional karena pasar beras internasional cukup tipis dan tidak stabil. Sebagian besar produksi beras dikonsumsi oleh negara-negara produsen, hanya 4% yang dijual ke pasar internasional. Kini saatnya Indonesia membangun kedaulatan pangan sebagai strategi untuk mencegah krisis pangan. Membangun kedaulatan pangan dapat dilakukan melalui peningkatan produksi pangan dan pengurangan konsumsi, disertai pembangunan perdesaan terpadu. Mengingat penyebab utama rendahnya produksi dan efisiensi produksi pangan adalah kecilnya skala usaha, janji pemerintah untuk menyediakan lahan pertanian abadi 15 juta ha disertai dengan reformasi agraria merupakan kebijakan yang strategis. Saat ini 30,67 juta ha lahan yang sesuai dan tersedia untuk pertanian dapat digunakan untuk memperluas lahan usaha tani tanaman pangan, khususnya padi. Upaya tersebut merupakan elemen kunci dalam meningkatkan produksi pangan. Dengan hasil padi nasional rata-rata 5 t/ha, pemanfaatan 15 juta ha lahan untuk padi dengan indeks tanam 1,5 akan menghasilkan sekitar 112 juta ton padi atau 70 juta ton beras. Jumlah ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi Indonesia juga dapat memainkan peran

penting dalam pasar beras internasional sebagai eksportir beras. Meningkatkan skala usaha tani juga merupakan elemen kunci dalam memperbaiki pendapatan usaha tani untuk mengentaskan petani dari kemiskinan.

3. Penelitian berikutnya Ening S dan Handewi PS (2008) berjudul Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Rawan Pangan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kerawanan pangan rumah tangga dan alternatif strategi penanggulangannya. Hasil analisis diharapkan menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan tingkat pusat maupun daerah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan menanggulangi kerawanan pangan rumah tangga. Data yang digunakan adalah data Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) tahun 1996-2005 dari Badan Pusat Statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) proporsi rumah tangga rawan pangan di provinsi-provinsi luar Jawa khususnya wilayah Kawasan Timur Indonesia dan daerah perdesaan relatif tinggi dibanding wilayah Kawasan Barat Indonesia dan daerah perkotaan, implikasinya adalah penanganan masalah rawan pangan perlu diprioritaskan pada wilayah-wilayah tersebut agar kesenjangan antara Kawasan Timur dan Barat Indonesia serta kesenjangan desa - kota tidak semakin melebar; (2) perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, masing-masing tingkatan pemerintahan melaksanakan kebijakan dan program ketahanan pangan dan penanganan masalah kerawanan pangan sesuai dengan mandat dan tupoksinya. Sementara itu, dalam upaya penanggulangan rawan pangan masyarakat diharapkan dapat berperan sesuai dengan kapasitas dan potensinya dan dapat diapresiasi pada kegiatan pemberdayaan posyandu, dasawisma, kepedulian sosial, kegiatan PKK dan aktifitas sosial keagamaan.
4. Penelitian terakhir yakni Wedy Nasrul (2012) berjudul Pengembangan Kelembagaan Pertanian Untuk Peningkatan Kapasitas Petani Terhadap Pembangunan Pertanian.

Kelembagaan dituntut mampu memberikan kekuatan bagi petani (posisi tawar yang tinggi). Kelembagaan pertanian dalam hal ini mampu memberikan jawaban atas permasalahan di atas. Penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan mutlak diperlukan oleh petani, agar mereka dapat bersaing dalam melaksanakan kegiatan usahatani dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pengembangan masyarakat petani melalui kelembagaan pertanian/kelompok tani merupakan suatu upaya pemberdayaan terencana yang dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh melalui usaha bersama petani untuk memperbaiki keragaman sistem perekonomian masyarakat pedesaan. Arah pemberdayaan petani akan disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dirumuskan bersama. Dengan partisipasi yang tinggi terhadap kelembagaan petani, diharapkan rasa ikut memiliki dari masyarakat atas semua kegiatan yang dilaksanakan akan juga tinggi. Perumusan format upaya pemberdayaan masyarakat desa haruslah berbasis pada dua prinsip dasar pendekatan. Yang pertama, bagaimana menciptakan peluang bagi masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk memanfaatkan peluang tersebut. Upaya pemberdayaan desa seyogyanya tidak dilakukan dengan berbasis pada suatu grand scenario, karena hal yang seperti itu tidak pernah mampu memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Pemberdayaan kelembagaan menuntut perubahan operasional tiga pilar kelembagaan yaitu : Kelembagaan lokal tradisional yang hidup dan eksisi dalam komunitas (*voluntary sector*), Kelembagaan pasar (*private sector*) yang dijiwai ideologi ekonomi terbuka dan Kelembagaan sistem politik atau pengambilan keputusan di tingkat publik (*public sector*).

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah adanya amanah atau mandat dari publik kepada lembaga legislatif dan eksekutif beserta birokrasinya dengan tujuan untuk membuat kebijakan yang mampu mengaspirasikan kepentingan publik. Adanya demokrasi pada kebijakan publik sangat dibutuhkan agar kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai bersama, sehingga pemerintahan ditujukan untuk kepentingan publik, bukan administrator publik (Triastuti, 2003).

Kebijakan dirumuskan sebagai sebuah keputusan tegas dari adanya perilaku konsisten serta pengulangan pada setiap bagian dari individu yang melaksanakannya (Hermabin *et al*, 2014). Menurut Efendi dan Makhfudli (2009:135), kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik dengan mengikat orang banyak pada tataran strategis yang bersifat garis besar. Definisi lain dari kebijakan publik sebagaimana diungkapkan oleh Wibowo (dalam Hamid, 2015). Kebijakan publik menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana yang diungkapkan oleh Darmawi (2013) diartikan sebagai pedoman untuk bertindak.

Menurut Muchlis Hamdi, kebijakan (*policy*) umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu (2014:36). Namun, kebijakan bukanlah sekedar keputusan yang ditetapkan, Hamdi (2014:36) mengartikan kebijakan (*policy*) lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, daripada hanya sekedar suatu keputusan. Selanjutnya, Anggara (2014:35) mendefinisikan bahwa :

“Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menerapkan suatu kebijakan.”

Untuk keperluan praktis, agar mempermudah pengamatan atas fenomena kebijakan yang aktual, Anggara (2014:36) mengatakan bahwa :

“Kebijakan publik adalah suatu keputusan untuk mengatasi masalah tertentu agar mencapai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan. Dalam kehidupan administrasi publik, secara formal keputusan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk perundang-undangan.”

Kebijakan publik dapat dipahami berdasarkan konsep dasarnya, yaitu kebijakan dan publik. Kebijakan diartikan sebagai pilihan tindakan di antara sejumlah alternatif yang tersedia. Hal tersebut menjelaskan bahwa kebijakan merupakan hasil menimbang untuk memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. Kebijakan memiliki kaitan erat dengan pengambilan keputusan karena pada hakikatnya sama-sama memilih di antara pilihan yang tersedia. Sedangkan publik memiliki kaitan erat dengan *state*, *market* dan *civil society*. Ketiga hal tersebut menjadi aktor dalam arena publik sehingga publik dapat dipahami sebagai ruang dimensi yang menunjukkan interaksi antara *state*, *market* dan *civil society* (Efendi & Makhfudli, 2009:137).

Kebijakan publik memiliki dua rumusan, di antaranya (Dwidjowijoto, 2006:23):

- a. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh administratur Negara atau administratur publik. Berdasarkan pengertian tersebut, kebijakan publik dianggap sebagai segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan tersebut berhubungan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antarwarga maupun antar warga dan pemerintah. Pihak yang membuat kebijakan publik adalah pemerintah Negara. Pada tingkat Nasional, pemerintah Negara terdiri dari seluruh lembaga Negara yaitu lembaga legislatif (MPR dan DPR), eksekutif (Pemerintah Pusat, Presiden dan Kabinet), yudikatif (Mahkamah Agung dan Peradilan) dan akuntatif (BPK).

Pada tingkat daerah kota, lembaga administratif publik terdiri dari Pemerintah Daerah Kota dan DPRD Kota. Terkait dengan kepentingan Negara Indonesia, lembaga administrasi Negara dibatasi hanya pada pemerintah atau lembaga eksekutif.

- b. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kebijakan publik, bukan kehidupan orang perorangan atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di lingkup lembaga administratif publik. Kebijakan publik mengatur tentang masalah bersama atau masalah pribadi atau golongan, yang telah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat di suatu daerah.

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Terdapat lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik, yaitu: a) tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan harus menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi; b) kebijakan merupakan pola atau model tindakan pejabat pemerintah tentang keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah; c) kebijakan harus mencakup apa yang nyata dari apa yang diperbuat oleh pemerintah, bukan tentang apa yang pe

merintah maksud untuk berbuat atau tentang apa yang pemerintah katakan atau dikerjakan; d) kebijakan dapat berupa hal yang positif atau negatif; dan e) kebijakan dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan (Nurcbolis, 2007:264).

Dari berbagai pandangan dan definisi tentang kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun, lebih lanjut Hamdi (2014:37) menegaskan bahwa kebijakan publik memiliki karakter utama antara lain sebagai berikut:

- a. Setiap kebijakan publik selalu memiliki tujuan, yakni untuk menyelesaikan masalah publik;
- b. Setiap kebijakan publik selalu merupakan pola tindakan yang terjabarkan dalam program dan kegiatan;
- c. Setiap kebijakan publik selalu termuat dalam hukum positif.

Setiap kebijakan publik akan selalu mengandung makna sebagai upaya masyarakat untuk mencari pemecahan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, kebijakan publik juga dapat dipandang sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah bersama warga negara yang tidak dapat mereka tanggulangi secara perorangan. Senyatanya, kebijakan publik dikenali secara sektor per sektor atau menurut urusan pemerintahan misalnya: kebijakan kesehatan, kebijakan pendidikan, kebijakan pertanian, kebijakan lingkungan dan sebagainya. Oleh karena itu, persoalan yang diharapkan dapat diselesaikan melalui kebijakan publik adalah persoalan yang berkaitan dengan kebijakan secara spesifik tersebut.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan pedoman yang digunakan untuk bertindak dalam mengatur atau membuat keputusan guna memenuhi kebutuhan publik, kebijakan ini dibuat oleh pemegang otoritas publik.

2.2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi pada artian sederhana diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi suatu kebijakan merupakan implementasi terhadap suatu program yang memiliki tujuan, visi, dan misi tertentu. implementasi program adalah inti menjadi seorang ekstensi atau penyuluh dalam perencanaan sebuah proyek atau kegiatan. Dengan demikian sebuah program tidak dapat terlepas dari sebuah perencanaan guna mengambil inisiatif

keputusan dalam menetapkan sebuah prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Payne, 2008).

Implementasi merupakan perwujudan dari program-program yang telah ditetapkan dalam perumusan strategi. Hakikat utama dari implementasi adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Terdapat empat aspek yang harus diperhatikan dalam mengimplimentasikan suatu program atau kebijakan, yaitu: siapa yang dilibatkan dalam implementasi, hakikat proses administrasi, kepatuhan atas suatu kebijakan dan efek atau dampak dari implementasi (Payne, 2008).

Solichin, (2012:139) mengartikan implementasi dengan lebih rinci, yaitu:

Implementation is the carrying out of basic policy decision usually incorporated in statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions. Ideally that decisions identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the objective(s) to be pursued, and in a variety of ways, "structures" the implementation process. The process normally runs through a number of stages begin ning with passage of the basic ststue, followed by the policy outputs(decision) of implementing agencies, the compliance of target groups with those decisions, the actual impacts both intended nd unintended of those outpuis the perceived impacts of agency decision, and finally important revision (or attempted revisions) in basic statute.

Maksud dari paragraf di atas adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lain. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Selajutnya, Hosio (2007:47) menyebutkan bahwa implementasi ialah "proses yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan Negara diwujudkan sebagai "outcome" (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah".

Implementasi kebijakan dianggap sebagai aspek terpenting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan adalah wujud nyata dari suatu kebijakan karena pada tahapan implementasi, suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil dari kebijakan melainkan memiliki keterkaitan dengan konsepsi atau dampak yang akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan yang dijalankan.

Menurut Solichin (2012:141) implementasi kebijakan sebagai negara sebagai suatu organisasi publik selain mempunyai tujuan (*goals*) yang harus direalisasikan, ia juga mempunyai berbagai permasalahan yang harus diatasi, dikurangi atau dicegah. Permasalahan tersebut bisa berasal dari masyarakat itu sendiri, bisa juga berasal sebagai dampak negatif dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik, yaitu, nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujud yang meskipun bisa diidentifikasi tetapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik.

Karakteristik masalah publik yang harus diatasi selain bersifat interdependensi juga bersifat dinamis, sehingga pemecahannya memerlukan pendekatan holistik (*holistic approach*), yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagai bagian dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur sendirian. Dengan demikian, karena masalah-masalah publik tidak bisa diatasi secara perorangan dan di samping itu dikehendaki pemecahan secara efektif dan efisien, maka mensyaratkan adanya proses perumusan masalah dan penetapan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar sekali suatu kebijakan publik ditetapkan dan diimplementasikan maka dampak positifnya akan dirasakan oleh publik secara luas, termasuk oleh pembuat kebijakan itu sendiri.

Implementasi merupakan bagian dari keseluruhan tahapan dalam proses kebijaksanaan publik, yang diawali dengan perencanaan hingga evaluasi dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan dari kebijaksanaan (Hermabin *et al*, 2014). Islami (2004) menguraikan berbagai elemen

penting yang ada dalam kebijakan publik sebagaimana yang diungkapkan oleh Hamid (2015) adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan publik bentuk Perda yaitu berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan publik harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata, jadi tidak cukup jika hanya dinyatakan.
3. Kebijakan publik dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu, baik hal tersebut untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

Menurut Nurcholis (2005:265) terdapat lima tahapan dalam proses terjadinya kebijakan yaitu sebagai berikut:

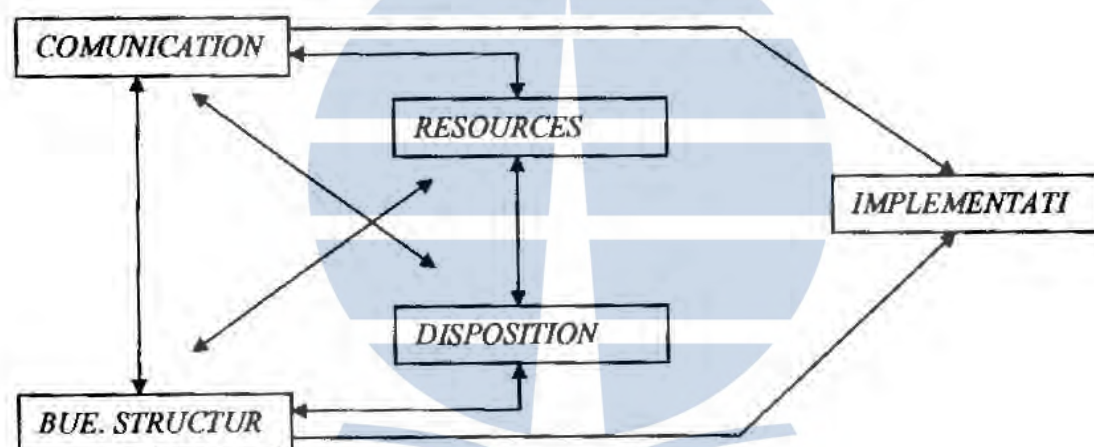
1. *Identification of needs*, yakni melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat dengan kriteria antara lain analisis data, sampel, data statistik, model simulasi, analisis sebab akibat, dan teknik peramalan.
2. Formulasi usulan kebijakan yakni meliputi faktor strategik serta alternatif yang bersifat umum dan analisis dampak lingkungan.
3. Mengadopsi analisis kelayakan politik dengan menggabungkan beberapa teori politik dan teknik penganggaran.
4. Pelaksanaan program yang meliputi bentuk organisasi, model penjadwalan, penjabaran keputusan, serta teknis pelaksanaannya.
5. Evaluasi yang meliputi penggunaan metode eksperimental, sistem informasi, auditing, serta evaluasi mendadak.

Penjelasan teori terkait dengan implementasi kebijakan publik tersebut dikaitkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 yakni konsep rencana anggaran yang termasuk dalam identifikasi kebutuhan masyarakat berdasarkan analisis data yang ditemukan di lapangan serta analisis kelayakan politik melalui teknik penganggaran,

kebutuhan pegawai sebagai salah satu bentuk formulasi usulan kebijakan yang bersifat umum, pengembangan pegawai sebagai bentuk pelaksanaan program, kesejahteraan pegawai sebagai hasil dari pelaksanaan program, kinerja pegawai merupakan bentuk respon atau timbal balik dari hasil pelaksanaan program, pendayagunaan pejabat fungsional, kegiatan kedinasan dan evaluasi organisasi sebagai bentuk penggunaan metode eksperimental, sistem informasi, auditing, serta evaluasi mendadak.

Implementasi kebijakan dapat digambarkan dengan model dari Georde Edward III dalam Arsyad (2006) sebagai berikut :

Gambar 2.1 Model Implementasi George C. Edward III



Adapun beberapa faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan. Kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil atau gagal dengan melihat variabel berikut (Edward III dalam Darmawi, 2013):

1. Komunikasi

Komunikasi memiliki peranan yang penting bagi para implementator dan para "policy maker". Hal ini dilakukan dengan tujuan agar implementasi dapat berjalan dengan efektif dan untuk menghindari kesalahpahaman diantara para pelaksana, sehingga komunikasi harus

jelas dan tegas. Adapun tujuan dari komunikasi ini adalah agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

2. Sumber Daya

Sumber daya juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan kebijakan, karena meskipun komunikasi yang disampaikan baik akan tetapi sumber daya tidak bersedia untuk memperlancar implementasi kebijakan, maka implementasi ini akan mengalami kegagalan. Sumber daya dalam hal ini meliputi staf yang memiliki keahlian untuk melaksanakan tugas, jumlah staf yang dibutuhkan, dana untuk membiayai implementasi, serta kewenangan dan fasilitas yang dimiliki.

3. Disposisi

Disposisi juga merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan, karena para implementator tidak hanya membutuhkan kemampuan, akan tetapi juga harus mempunyai kemauan dan keleluasaan atas kebijakan yang sangat kompleks. Menurut pendapat lain, disposisi ini masih harus di saring melalui persepsi dari pelaksana dalam batas kebijakan yang dilaksanakan.

4. Struktur Birokrasi

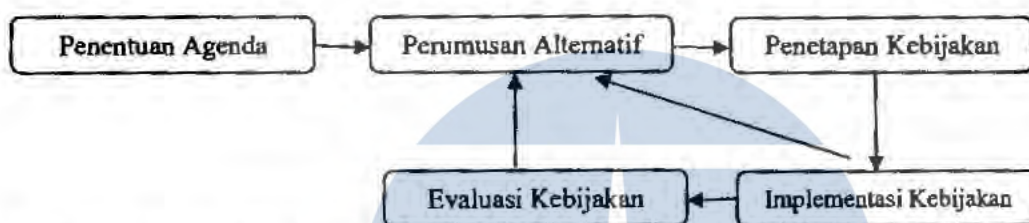
Efisien atau tidaknya struktur birokrasi menjadi faktor terpenting yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi ini meliputi struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit organisasi baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi.

2.2.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian fase kegiatan untuk membuat kebijakan publik. Meskipun rangkaian tahapan ini terlihat linear, dalam

kenyataannya tahap-tahap tersebut iteratif atau tidak linear sama sekali. Para ahli kebijakan publik memberikan nama dan kelompok yang berbeda dalam tahapan proses kebijakan publik. Akan tetapi menurut Hamdi (2014:79), tahap kebijakan publik terdiri atas lima tahap yaitu: penentuan agenda (*agenda setting*), perumusan alternatif kebijakan (*policy formulation*), penetapan kebijakan (*policy legitimation*), pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*), dan penilaian kebijakan (*policy evaluation*).

Gambar 2.2 Proses Kebijakan Publik



Sumber : Hamdi (2014:79)

Untuk lebih jelasnya, berikut penjabaran tentang tahap kebijakan publik (Nurcholis, 2007:264):

- a. Penentuan agenda (*agenda setting*); dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria yaitu: menganalisis data sampel, data statistik, model-model simulasi, analisis sebagai akibat dan teknik-teknik peramalan.
- b. Perumusan alternatif (*policy formulation*); mencakup tentang faktor-faktor strategik, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan.
- c. Penetapan kebijakan (*policy legitimation*); mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik dan penggunaan teknik-teknik penganggaran.

- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*); mencakup bentuk-bentuk organisasi, model penjadwalan, penjabaran keputusan-keputusan, keputusan-keputusan penetapan harga dan skenario pelaksanaan.
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*); mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing dan evaluasi mendadak.

Struktur birokrasi merupakan suatu struktur yang memiliki tugas untuk mengimplimentasikan kehijakan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap implimentasi kebijakan. Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Meskipun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan telah tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Adanya kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal tersebut akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Sebagai pelaksana sebuah kebijakan, birokrasi harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, yaitu *Standar Operating Procedures* (SOPs) dan melaksanakan fregmentasi.

1) *Standar Operating Procedures (SOPs)*

SOPs merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan warga. Pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat difungsikan untuk menyeragamkan tindakan-tindakan birokrat dalam organisasi yang kompleks dan luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. SOPs digunakan untuk menangani tugas secara rutin sebagaimana standar dirancang untuk kebijakan-kebijakan yang baru, namun standar lebih menghambat dibandingkan membantu megimplementasikan kebijakan, yakni sulitnya terjadi perubahan, penundaan, pembaharuan, atau tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki.

2) *Fragmentasi*

Fragmentasi merupakan organisasi pelaksana yang telah terpecah-pecah menjadi distorsi dalam suatu pelaksanaan kebijakan. Fragmentasi juga diartikan sebagai penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa organisasi yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi, umumnya koordinasi pada hal ini diperlukan guna melaksanakan kebijakan, namun ditemukan beberapa hambatan yang kurang berarti dalam pelaksanaan kebijakan. Beberapa hambatan dalam fragmentasi memiliki beberapa poin penting, yaitu:

- a) Tidak adanya otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan, karena pecahnya fungsi tertentu dalam lembaga atau organisasi yang berbeda-beda.

- b) Pandangan yang sempit akan lembaga atau organisasi dalam mempertahankan visi dan misi yang mempunyai fleksibilitas yang memungkinkan menentang kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.

2.2.4 *Good Governance*

Menurut Andrianto N (2007:223) *governance* merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk mengganti istilah *government*, yang menunjuk penggunaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan. *Governance* yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.

Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutamakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Defenisi lain menyebutkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sector negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Hal ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari *terminology governance* membantah pemahaman formal tentang berkerjanya institusi-institusi negara. *Governance* mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang berkerja pada tingkat yang berbeda (Wasistiono, 2003:122).

Governance sebagai proses pengambilan keputusan dan proses yang mana keputusan itu diimplementasikan, maka analisis *governance* difokuskan pada faktor-faktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasinya serta struktur formal dan informal yang disusun untuk mendatangkan implementasi keputusan.. *Governance* dapat

digunakan dalam beberapa konteks seperti *corporate governance*, *international governance*, *national governance* dan *local governance*.

Menurut Nurcholis (2007:224) mengatakan *governance* merupakan serangkaian proses interaksi social politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal.

Pengertian *Good Governance* Istilah *Good Governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan. *Good Governance* sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *Agent of Change* dari suatu masyarakat berkembang/developing di dalam negara berkembang. *Agent of change* karena perubahan yang dikehendakinya, menjadi *planned change* (perubahan yang berencana), maka disebut juga *Agent of Development*. *Agent of Development* diartikan sebagai pendorong proses pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program, proyek-proyek, dan peran perencanaan dalam anggaran.

Orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan yang baik. Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi. Tata

pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. *Good governance* adalah masalah perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat. *Good Governance* dapat disimpulkan bahwa suatu konsep tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan masyarakat yang solid dan bertanggung jawab secara efektif melalui pembuatan peraturan dan kebijakan yang absah dan yang merujuk pada kesejahteraan rakyat, pengambilan keputusan, serta tata laksana pelaksanaan kebijakan. Pengertian *good governance* diatas merupakan suatu pemahaman atau pijakan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.2.5 Aspek-Aspek *Good Governance*

Good Governance menurut Andrianto N (2007:14), adalah

“*The way state power is used in managing economic and social resources for development and society*”. *Governance* mempunyai tiga kaki (three legs), yaitu:

1. *Economic governance* meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making processes*) yang memfasilitasi terhadap *equity, poverty* dan *quality of live*.
2. *Political governance* adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan.
3. *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan.

Dari aspek pemerintah (*governance*), *good governance* dapat dilihat melalui aspek:

1. Hukum/kebijakan ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik dan ekonomi.
2. *Administrative competence and tranparency*. Kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administrasi serta keterbukaan informasi.

3. Desentralisasi. Desentralisasi regional dan dekosentrasi di dalam departemen.
4. Penciptaan pasar yang kompetitif. Penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi.

2.2.6 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Berdasarkan pengertian *Good Governance* oleh Mardiasmo dan Bank Dunia yang disebutkan diatas dan sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur Negara termasuk daerah adalah perlunya mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka menuntut penggunaan konsep *Good Governance* sebagai pemerintahan yang baik, relevan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Negara merupakan institusi yang legal formal dan konstitusional yang menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi sebagai regulator maupun sebagai *Agent of Change*. Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa *Good Governance* awalnya digunakan dalam dunia usaha (*corporate*) dan adanya desakan untuk menyusun sebuah konsep dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada korporasi dan manajemen profesionalnya, maka ditetapkan *Good Corporate Governance*.

Prinsip-prinsip utama dalam *Governance Corporate* adalah transparansi, akuntabilitas, fairness, responsibilitas, dan responsivitas. Prinsip-prinsip Sembilan pokok karakteristik *Good Governance*, yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*) Setiap warga Negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara secara berpartisipasi secara konstruktif

2. Penerapan Hukum (*Fairness*). Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.
3. Transparansi (*Transparency*) Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
4. Responsivitas (*Responsiveness*) Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
5. Orientasi (*Consensus Orientation*) *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. Keadilan (*Equity*) Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan ataupun menjaga kesejahteraan mereka dan terlibat di dalam pemerintahan.
7. Efektivitas (*Effectiveness*) Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. Akuntabilitas (*Accountability*) Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
9. Strategi visi (*Strategic vision*) pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Keseluruhan ciri *good governance* tersebut diatas adalah saling memperkuat dan saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Misalnya, informasi semakin mudah diakses berarti transparansi semakin baik, tingkat partisipasi akan semakin luas, dan proses pengambilan keputusan akan semakin efektif. Partisipasi yang semakin luas akan berkontribusi kepada dua hal, yaitu terhadap pertukaran informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan dan memperkuat keabsahan atau legitimasi atas berbagai keputusan yang ditetapkan. Tingkat legitimasi keputusan yang kuat pada gilirannya akan mendorong efektifitas pelaksanaannya. Kelembagaan yang *responsive* harus transparan dan berfungsi sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku agar keberfungsianannya itu dapat bernilai dan berkeadilan. Prinsip-prinsip diatas merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam hal pelaksanaan *good governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki stakeholders. *Good governance* berkenaan dengan masalah bagaimana suatu organisasi ditata dan bagaimana tataannya tersebut berproses jadi prinsipnya adalah implementasi sudah sesuai dengan rencana, apakah hasil yang diperoleh benar-benar bermanfaat bagi masyarakat (Wasistiono, 2003:53).

2.2.7 Kinerja Pegawai Pemerintah

Menurut Cascio (2013:275) menyatakan "*performance refer to an employees accomplishment of assigned task*" hal ini berarti kinerja mengacu pada penyelesaian tugas seorang pegawai atas pekerjaan yang telah ditetapkan untuknya. Kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan dalam melakukan suatu pekerjaan (Robbins, 2012:319).

Menurut Gibson, Ivancevich dan Donnelly (2000:325) kinerja adalah tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Batasan tersebut mengandung makna bahwa kinerja dinyatakan baik dan sukses jika

tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Menurut Mathis (2006:113-114), *employee performance individual* adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Selain pegawai dapat menjadi keunggulan bersaing, mereka juga dapat menjadi penghambat bagi kemajuan institusi.

Sedangkan menurut Siagian (2005:136) kinerja merupakan perilaku yang ditampakan oleh individu atau kelompok, ditinjau dari segi berperilaku, kepribadian seseorang sering menampilkan dirinya dalam berbagai bentuk sikap, cara berpikir, cara bertindak dan berbagai hal lain yang mempengaruhi kepribadian seseorang dalam bertindak yang kemudian mempengaruhi kepribadian organisasional yang tercermin dalam perilakunya, yang ada gilirannya akan mempengaruhi kinerjanya.

2.2.7.1 Pengukuran Kinerja Pegawai

Menurut Mathis dan Jackson (2006:376) pengukuran dalam penilaian yang mempengaruhi *performance* diantaranya:

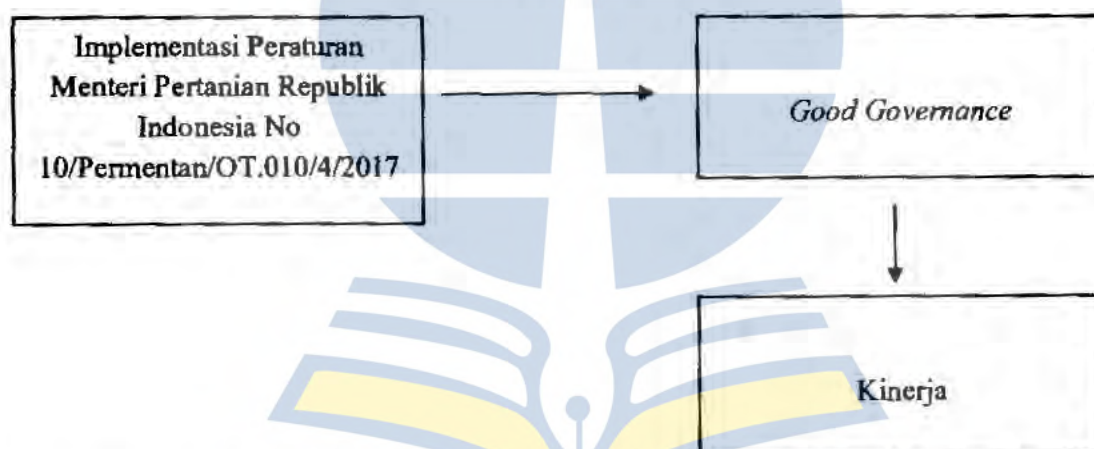
1. *Quantity Of Work* merupakan penilaian atas kuantitas keseluruhan hasil kerja. Pengukuran berdasarkan hasil *input* dan *output* dalam bekerja.
2. *Quality Of Work* yakni pengukuran usaha yang dilakukan oleh individu dalam menjaga kualitas pekerjaan yang diberikan khususnya pada proses pencapaian tujuan institusi.
3. *Time Accuracy* berkaitan dengan ketepatan serta kecepatan dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan yang ditugaskan atau diberikan sesuai keakuratan target waktu yang ditetapkan
4. *Attendance* menunjukkan partisipasi serta kehadiran maupun keterlibatan individu dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi pada pekerjaan dengan baik dan tepat.
5. *Work Cooperation* dimana dalam hal ini berkaitan dengan kerjasama yang ditunjukkan individu dengan rekan kerja lain maupun atasan dalam menyelesaikan berbagai hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Kerjasama yang baik dimana dapat memberikan dampak yang baik bagi individu lain atau pihak sekitar dalam menyelesaikan pekerjaan.

Penilaian kinerja dirancang untuk membantu evaluasi dari setiap pegawai yang ada di dalamnya seperti meningkatkan pencapaian hasil untuk membantu tercapainya tujuan institusi pemerintah, mengembangkan kapabilitas dan juga menetapkan konsekuensi terhadap tingkat kinerja dalam membuat keputusan dalam mencapai tujuan serta ketetapan sebagai pegawai pemerintah khususnya pelayanan publik.

2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan berbagai referensi dan konsep yang relevan dengan penelitian terdahulu maka disusun sebuah kerangka pikir penelitian dan dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir



2.4 Operasional Konsep

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini menganalisa dua konsep yakni implementasi Permentan dikaitkan dengan Good Governance serta hasil kinerja pegawai pemerintahan. Implementasi pada artian sederhana diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi suatu kebijakan merupakan implementasi terhadap suatu program yang memiliki tujuan, visi, dan misi tertentu. implementasi program adalah inti menjadi

seorang ekstensi atau penyuluh dalam perencanaan sebuah proyek atau kegiatan. Aspek-aspek Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 :

1. Konsep Rencana Anggaran
2. Kebutuhan Pegawai
3. Pengembangan Pegawai
4. Kesejahteraan Pegawai
5. Kinerja Pegawai
6. Pendayagunaan Pejabat Fungsional
7. Kegiatan Kedinasan
8. Evaluasi Organisasi.

Good Governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *Agent of Change* dari suatu masyarakat berkembang/*developing* di dalam negara berkembang. Hal ini berkaitan juga dengan hasil kinerja yang dicapai oleh pegawai pemerintahan. Aspek-aspek *Good Governance* sebagai berikut

1. Partisipasi (*Participation*)
2. Penerapan Hukum (*Fairness*)
3. Transparansi (*Transparency*)
4. Responsivitas (*Responsiveness*).
5. Orientasi (*Consensus Orientation*)
6. Keadilan (*Equity*)
7. Efektivitas (*Effectiveness*)
8. Akuntabilitas (*Accountability*)
9. Strategi visi (*Strategic vision*)

10. Kuantitas Kerja
11. Kualitas Kerja
12. Ketepatan Waktu
13. Kerjasama
14. Keterlibatan

Konsep yang dibahas pada penelitian ini dikaitkan dengan uraian Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 Tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unite Kerja Eselon IV Lingkup Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung yang terdiri dari uraian tugas pada tiap sub bagian di Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung diukur dengan standar hasil kerja yang ditetapkan apakah sesuai dengan peraturan atau justru sebaliknya. Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 Tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung kemudian dikaitkan dengan data hasil pertanian pada periode tahun 2017-2018 ditinjau dari hasil pertanian yang dihasilkan. Penjelasan mengenai kondisi *Good Governance* yang harus dicapai Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung. Peraturan Menteri Pertanian ini merupakan salah satu kebijakan publik dalam rangka meningkatkan pembangunan pertanian serta mewujudkan sistem tata kelola yang baik (*Good Governance*) institusi khususnya bidang pertanian.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif merupakan deskripsi tentang data terkait dengan pengalaman secara langsung. Kualitatif lebih menekankan pada pemahaman dan bukan sekedar menerangkan tentang gejala-gejala yang tampak. Kualitatif juga diartikan sebagai metode dalam penelitian yang berusaha menyikapi dan menjelaskan tentang gejala-gejala terkait dengan tingkah laku sebagaimana gejala-gejala terkait dengan tingkah laku tersebut mampu mengungkapkan dirinya secara langsung dalam pengalaman yang dimiliki (Hall & Lindzey, 2010:173).

3.2 Sumber Informasi

Sumber informasi pada penelitian ini adalah informan terkait dengan penerapan peraturan di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tana Tidung yakni

1. Kepala Bidang Pertanian
2. Kepala Seksi Identifikasi dan Pendataan Statistik Tanaman Pangan
3. Kepala Seksi Administrasi Sarana dan Prasarana
4. Kepala Seksi Administrasi Teknologi Budidaya Pertanian

3.3 Prosedur Pengambilan Data

Pengambilan data adalah suatu proses data primer untuk keperluan dalam penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang dikumpulkan harus valid. Valid atau tidaknya data yang dikumpulkan harus melalui beberapa metode dalam membantu pengumpulan data yang lengkap sehingga dapat mendukung landasan teori. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Studi lapangan

Studi lapangan adalah studi yang dimaksudkan untuk mengamati, mempelajari dan memperoleh data. Studi lapangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data pada studi kualitatif agar dapat memperoleh informasi mendalam terkait dengan persepsi, pendapat, kepercayaan dan sikap tentang hal-hal yang berkaitan dengan epidemiologi. Berikut rangkaian kegiatan yang dilakukan pada saat melakukan wawancara mendalam (Budiarto & Anggraeni, 2003:46):

- 1) Persiapan, berikut tahapan-tahapan yang harus dilakukan:
 - a) Tentukan kriteria sasaran yang akan diwawancarai.
 - b) Menyusun pedoman wawancara sebagai instrumen wawancara.
 - c) Tentukan pewawancara.
 - d) Tentukan jadwal waktu wawancara.

- e) Rekrutmen responden yang sesuai dengan kriteria.
- 2) Pelaksanaan, berikut tahapan-tahapan yang harus dilakukan:
- a) Mengadakan perjanjian dengan responden tentang waktu yang tepat.
 - b) Menyiapkan ruangan agar wawancara dapat dilakukan dalam suasana yang tenang.
 - c) Wawancara diawali dengan memperkenalkan diri dan mengajukan pertanyaan yang mudah dijawab tentang hal-hal yang menjadi minat responden kemudian masuk dalam topik yang akan dicari.
 - d) Memberi kesempatan yang luas pada responden untuk menceritakan atau menjawab pertanyaan yang diajukan.

b. Observasi partisipan

Observasi partisipan merupakan bagian dari kerja lapangan, di mana kegiatan tersebut dilakukan di lapangan dengan disertai perangkat yang telah dipersiapkan. Observasi partisipan melibatkan keikutsertaan peneliti dengan individu yang diobservasi atau komunitas. Observasi partisipan membutuhkan suatu jalinan hubungan yang baik antara peneliti dengan komunitas yang akan diobservasi (Endraswara, 2006:140).

2. Studi pustaka

Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan

penelitian (Zed, 2008:3). Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah studi yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda lain (Zed, 2008:4).

b. Penelusuran data *online* atau internet

Penelusuran data *online* atau internet merupakan upaya penelusuran data yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet atau dilakukan secara *online*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data di mana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Dokumentasi digunakan oleh peneliti karena memudahkan peneliti untuk lebih memahami sumber-sumber sekunder lain (Sugiyono, 2012).

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan bagian dari pedoman wawancara. Instrumen penelitian memiliki tiga dasar makna yakni pertama instrumen penelitian menempati posisi teramat penting dalam hal apa dan bagaimana yang harus dilakukan pada saat di lapangan. Kedua yakni instrumen penelitian merupakan bagian paling rumit dalam keseluruhan proses penelitian. Ketiga yakni instrumen

penelitian kuantitatif memiliki dua fungsi yakni sebagai substitusi dan sebagai suplemen. Contoh instrumen yakni kuesioner (Burhan, 2014:105). Pedoman yang digunakan dalam wawancara berkaitan dengan

1. Penjelasan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 Tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung.
2. Target Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung terkait produktivitas pertanian.
3. Usaha yang dilakukan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung melalui implementasi kebijakan publik dalam rangka pencapaian target tersebut.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk mengkaji dan mengolah data yang telah terkumpul agar memperoleh simpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode analisis data lapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Spradley dimana proses wawancara informan terseleksi dengan pertanyaan khusus yang memilih jawaban secara fokus sesuai tujuan penelitian. Analisis data dilakukan khusus untuk menghubungkan bagaimana hubungan keseluruhan variabel penelitian yang dialami oleh informan sebagai responden (Sugiyono, 2014:255). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan (Moleong, 2011):

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi.
2. Reduksi data; dilakukan dalam penelitian dengan merangkum catatan-catatan lapangan dengan memilah hal-hal pokok yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, selanjutnya rangkuman catatan-catatan lapangan disusun secara sistematis agar gambaran dapat lebih tajam.
3. Kategorisasi; dilakukan dengan mengelompokkan data yang telah ditelaah dan direduksi sesuai dengan definisi variabel.
4. Pemeriksaan keabsahan data. Menguji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan informan lain untuk melakukan *crosscheck* hasil data yang diperoleh seperti hasil wawancara berupa rekaman, foto dan isian pernyataan yang *dicrosscheck* dengan dokumen tertulis perusahaan yang diminta. Ketika kedua sumber data sudah dinyatakan benar dan sama maka data yang *dicrosscheck* dinyatakan diuji keabsahannya.
5. Penafsiran data; dilakukan dengan menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan deskripsi analitik. Deskripsi analitik adalah rancangan yang dikembangkan dari kategori-kategori yang telah ditemukan dan mencari hubungan yang disarankan atau yang muncul dari data.
6. Menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan pada rumusan masalah penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang disajikan dalam bab ini didapatkan dari hasil wawancara serta pengamatan lapangan dilengkapi hasil analisis serta interpretasi sebagai bentuk hasil untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan pada bab sebelumnya. Hasil penyajian data, analisis data serta interpretasi teoritik memiliki keterkaitan atau hubungan menjadi kesatuan utuh yang saling melengkapi guna menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan. Berbagai informasi diperoleh yang dikumpulkan dan disusun sesuai ketentuan untuk pengambilan kesimpulan sesuai data lapangan terkait informasi yang disajikan dan diberikan oleh pihak narasumber serta berdasarkan hasil pengamatan.

Informasi data wawancara serta hasil pengamatan lapangan tersebut dianalisis dalam bentuk yang lebih sederhana, ilmiah serta ringkas sehingga mudah dipahami serta diinterpretasikan. Proses analisis data mengurutkan, menyusun serta mengorganisasikan data sesuai pola, kriteria maupun kategori sehingga dapat diuraikan sesuai tema dan hipotesis yang ditentukan berdasarkan data. Penjelasan serta penggambaran pola dibuat untuk mencari keterkaitan, hubungan, relasi serta pengaruh faktor yang menjadi hambatan sesuai interpretasi data sehingga sesuai dengan teori yang ditentukan. Penjelasan diberikan secara deskriptif sesuai metode penelitian kualitatif yang ditujukan untuk mengetahui hambatan secara konkret sesuai rumusan masalah yang diajukan dengan penjelasan makna yang

berhubungan dengan sebuah masalah disertai dengan pengaruh yang diberikan pada faktor yang dijelaskan.

Informasi diperoleh dari hasil lapangan dengan wawancara serta pengamatan disertai dukungan dokumentasi. Data diperoleh melalui proses pengumpulan secara langsung di Pemerintah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling secara langsung menunjuk informan yang terkait dengan masalah yang diajukan. Peneliti menunjuk langsung informan langsung sesuai masalah penerapan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 Tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unite Kerja Eselon IV Pada Dinas Pertanian.

Izin persetujuan penelitian dilakukan dengan menemui pihak Humas untuk memperoleh data awal. Bagian Humas memberikan ijin untuk dimintai data berupa wawancara serta data lapangan. Penentuan informan dipilih terkait tema yang diambil dalam penelitian sesuai keahlian bidang informan yang dibutuhkan oleh peneliti. Proses pengumpulan data lapangan kemudian diproses untuk mengecek keabsahan data melalui teknik pemeriksaan melalui pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda melalui permasalahan yang sama diajukan yang berkaitan melalui teknik triangulasi sumber data dengan membandingkan data dari sumber lain. Proses keabsahan data dilakukan dengan melakukan *cross check* terhadap kebenaran kepercayaan informasi melalui perbandingan data hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi dengan data lapangan. Perbandingan data dilakukan dengan menilai hasil penerapan penerapan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 Tentang Uraian

Tugas Pekerjaan Unite Kerja Eselon IV Lingkup Dinas Pertanian dalam mewujudkan *good governance* pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung

4.1 Profil Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dan RPJMD Kabupaten Tana Tidung adalah dokumen perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahunan di tingkat Nasional, Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Tana Tidung yang merupakan acuan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung dalam menyusun Renstra SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program dan kegiatan pembangunan bidang pertanian, pangan dan perikanan untuk jangka waktu 5 tahun yang akan datang. Renstra PD ini disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021. Dokumen RPJMD ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan semua dokumen operasional perencanaan pembangunan baik Renstra, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Tidung dan Rencana Kerja PD.

Kabupaten Tana Tidung memiliki luas wilayah administrasi seluas 4.828.58 km² atau 482.858 Ha, secara garis besar terbagi menjadi kawasan budidaya kehutanan (KBK) dan kawasan budidaya non kehutanan (KBNK). Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/KPTS-II/2001 dan Surat

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 554/Menhut-II/2013, kawasan budidaya kehutanan (KBK) mencakup luasan 170.340,64 Ha (53%) yang terbagi dalam hutan produksi (HP) seluas 151.378,24 Ha, hutan produksi terbatas (HPH) seluas 9.058,58 Ha dan hutan produksi konversi (HPK) seluas 9.876,82 Ha. Sedangkan kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) terdiri dari areal penggunaan lain (APL) seluas 163.771,70 Ha (41%) dan tubuh air seluas 23.402,22 Ha (7%).

Pembangunan pertanian di Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan untuk mendukung pencapaian misi kedua “meningkatkan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah dan berwawasan lingkungan” dan misi kesembilan “mengembangkan agroindustri pertanian”. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung menyusun Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tana Tidung dan bersifat indikatif yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian, pangan, dan perikanan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selanjutnya kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan, strategi dan program pembangunan bidang pertanian, pangan dan perikanan yang dituangkan dalam program dan kegiatan PD yang berisi rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif selama lima tahun ke depan. Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 - 2021 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang sesuai dengan visi, misi yang diaplikasikan melalui program kegiatan PD dengan sasaran yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 - 2021.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, pangan dan perikanan. Berdasarkan tugas pokok tersebut maka Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, pangan dan Perikanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, pangan dan Perkebunan.
- c) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang pertanian.
- d) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang pangan.
- e) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang perikanan.
- f) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- g) Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No10/Permentan/OT.010/4/2017

Aspek pertama yang dinilai dari penerapan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung terkait konsep rencana anggaran. Berbagai kebijakan dirancang oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung yang berkaitan dengan anggaran yang bertujuan untuk maksimalisasi produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat yaitu:

- a. Mengembangkan kebijakan dan strategi pembangunan pertanian yang jelas, tercermin pada tujuan, arah dan indikator kebijakan penciptaan kawasan pertanian
- b. Menetapkan prioritas pembangunan yang realistis dan diikuti oleh semua pihak baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
- c. Menetapkan sistem dan mekanisme komunikasi yang lancar dan transparan terkait dengan partisipasi.
- d. Menyiapkan kerangka peraturan dan arahan serta pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung selama mengelola kawasan pertanian.

Mekanisasi khususnya berkaitan dengan rencana anggaran tidak hanya terkait dengan berbagi keuntungan namun juga berbagi resiko. Penerapan Permentan dinilai mampu memberikan solusi bagi pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan, ekonomi serta memfasilitasi potensi daerah agar maksimal bahkan mampu meningkatkan

pendapatan daerah dengan memaksimalkan potensi pegawai melalui berbagai peraturan program yang ditetapkan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab, Tana Tidung.

Aspek berikutnya yakni berkaitan dengan kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai serta kinerja pegawai yang cakap, cekatan dengan kapabilitas mumpuni didukung oleh pendayagunaan pejabat fungsional . Tuntutan dengan bentuk konversi kesejahteraan pegawai dinilai sesuai. Fokus pencapaian tujuan melalui upaya melibatkan pihak investor dalam proyek pemerintah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung khususnya pengembangan sektor pertanian bukan tanpa alasan kuat. Ide ini terutama dilandasi oleh pemikiran bahwa pemenuhan sektor pertanian memerlukan dana yang besar. Sementara, kebutuhan infrastruktur terus meningkat baik karena penambahan penduduk maupun untuk penggantian infrastruktur lama yang telah usang.

Pelaksanaan berbagai upaya tersebut dibarengi dengan adanya perhatian pada pengembangan pegawai terkait dengan pemasaran hasil pertanian, pengembangan penelitian bibit pertanian dan sebagainya. Pencapaian hasil target tersebut sebagai bentuk penilaian kinerja pegawai. Bentuk dari hasil kinerja di atas yakni peningkatan produktivitas pertanian berdasarkan hasil wawancara sebagai beriku :

“Fokus dari hasil kerjasama tersebut dengan adanya kelengkapan fasillitas yang diberikan menjadikan peningkatan kinerja, podukivitas para pegawai sehingga berdampak pada peningkatan hasil sektor pertanian” (Kepala Seksi Identifikasi dan Pendataan Statistik Tanaman Pangan)

Manfaat pengembangan pegawai Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tana Tidung , memberi gambaran mengapa pengembangan pegawai menjadi

sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan pertanian khususnya wilayah pertanian Tana Tidung yang masih baru sehingga terkendala karena masalah pendanaan, teknologi, dan manajerial (kapabilitas pegawai).

Berbagai pihak terlibat dalam pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan serta pengawasan pertanian sebagai salah satu potensi kawasan pertanian lokal yang menjadi ciri khas Kab Tana Tidung.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara berikut

“jadi pada tahun lalu kita melakukan beberapa penawaran kerjasama dengan pihak luar dalam penanaman berbagai jenis tanaman yang laku di pasar internasional dengan perusahaan luar negeri yang mau bekerja sama untuk menggunakan pelabuhan serta lahan pengiriman hasil pertanian. Beberapa perusahaan negeri yang bersedia sedang dalam proses menjalin kerjasama kemudian mempresentasikan ide untuk pengembangan pertanian yang layak buat pasar luar negeri dan hal tersebut dinilai sesuai dengan perencanaan jangka panjang Kab Tana Tidung dengan pengembangan berbagai fasilitas kawasan pertanian untuk masa yang akan datang dinilai memiliki peluang yang cukup besar” (Kepala Seksi Administrasi Teknologi Budidaya Pertanian)

Berdasarkan wawancara tersebut dijelaskan secara rinci penerapan implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung mengembangkan sektor pertanian yang dilakukan oleh pihak organisasi khususnya pegawai dalam mewujudkan *good governance* sebagai pengelola tata kelola pemerintahan dalam mencapai visi yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dengan institusi lain yang bersedia untuk bekerjasama .

Lokasi kawasan pertanian Tana Tidung saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat di berbagai hal dengan penambahan lokasi dengan berbagai jenis

tanaman yang dinilai memiliki prospek baik ke depan. Pertambahan jumlah penduduk tersebut mendorong pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung untuk senantiasa menambah jumlah produksi pertanian. Kebutuhan infrastruktur pertanian cukup besar dan kian meningkat seiring perkembangan teknologi serta komunikasi.

Hasil dari pengembangan kawasan pertanian serta usaha pengembangan hasil pertanian melalui tata kelola pemerintahan serta kinerja pegawai sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 . Hasil kerjasama Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung berhasil meningkatkan kapasitas pegawai serta mewujudkan *good governance* serta membuka kesempatan bagi warga untuk bekerjasama mengelola lahan yang digunakan sebagai kawasan pertanian lokal dan berdasarkan ide dan sistem kerjasama yang dipaparkan. Proses awal pembangunan fasilitas pun dilakukan melalui proses negosiasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan bibit, penanaman, perawatan, pemanenan hingga proses pemasaran. Sektor fasilitas mulai dari waktu pengerjaan fasilitas, lama batasan waktu pembangunan, *quality* kontrol kinerja serta kondisi keuangan. Berbagai hal terkait dengan analisis resiko solusi ketika resiko terjadi menjadi hal yang dibahas dan dinegosiasikan dengan pihak yang terlibat. Ketika pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dan beberapa warga sebagai pengelola pihak tersebut membahas terkait berbagai hal yang ada dalam kerjasama, pelaksana pembangunan, pengawasan dan berbagai hal tersebut harus sesuai

dengan tujuan serta dilaksanakan berdasarkan koridor yang tidak bertentangan dengan prosedur yang ditentukan.

Secara rinci terkait proses awal permulaan proses pihak Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dalam rangka mengembangkan strategi jangka pendek adalah mengoptimalkan staf yang ada dalam melaksanakan tugas dan fungsi sambil tetap terus melakukan analisis beban kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung berdasarkan volume dan beban kerja secara proporsional dengan melihat tingkat pendidikan, keahlian teknis dan sosial kultural. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung terus melakukan koordinasi secara rutin baik vertikal maupun horizontal dengan berbagai pihak terkait penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) guna menyediakan data pendukung volume beban kerja, tugas dan fungsi dinas yang dipakai untuk penentuan struktur maupun pelaksanaan tugas. Pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung bekerja sama untuk mengembangkan pertanian dan perkebunan di Tana Tidung. Sektor pertanian dan perkebunan di Kab. Tana Tidung saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat di berbagai hal dengan penambahan berbagai target kerja sebagai wilayah yang ditargetkan sebagai penghasil terbesar hasil pertanian dan perkebunan. Pertambahan jumlah produktivitas hasil pertanian dan perkebunan tersebut mendorong pihak Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dan Pengelola untuk senantiasa menambah jumlah fasilitas pendukung pertanian dan perkebunan yang ada.

Hasil dari kinerja para pejabat eselon terkait dengan pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan hasil kerjasama Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dan Bupati berhasil membuka kesempatan bagi warga untuk bekerjasama mengelola lahan yang digunakan sebagai kawasan pertanian dan perkebunan dan berdasarkan ide dan sistem kerjasama yang dipaparkan. Hasil dari adanya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memenuhi berbagai aspek indikator *good governance* dengan hasil berhasilnya tata kelola pemerintahan maka mendorong proses awal pembangunan fasilitas pun dilakukan melalui proses negosiasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan acara persiapan pembangunan waduk kemudian mulai dari waktu pengerjaan fasilitas, lama batasan waktu pembangunan, *quality control* kinerja serta kondisi keuangan. Berbagai hal terkait dengan analisis resiko solusi ketika resiko terjadi menjadi hal yang dibahas dan dinegosiasikan dengan pihak yang terlibat. Ketika pihak Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung setuju menunjuk Bupati dan beberapa warga sebagai pengelola pihak tersebut membahas terkait berbagai hal yang ada dalam kerjasama, pelaksana pembangunan, pengawasan dan berbagai hal tersebut harus sesuai dengan tujuan serta dilaksanakan berdasarkan koridor yang tidak bertentangan dengan prosedur yang ditentukan. Kawasan pengembangan pertanian dan perkebunan tersebut untuk dikelola dan hasil keuntungan dibagikan pada Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung.

Kendala yang masih terjadi dalam proses implementasi kebijakan antara lain pembagian tugas yang belum merata dan proporsional di tingkat staff sebagai

penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung karena belum tersedian analisis beban kerja dinas sehingga menimbulkan berbagai kesulitan. Kesulitan dalam mengawasi proyek, perbedaan persepsi dengan pihak swasta, implementasi proyek yang tidak sesuai kebijakan, prosedur dan tujuan. Minimnya kemampuan kapasitas karyawan yang tersedia menghambat proses selama kerjasama dilakukan. Rumitnya birokrasi dengan berbagai prosedur yang harus dilalui dalam setiap keputusan yang diambil terkait pengadaan fasilitas serta biaya investasi yang minim. Peningkatan sarana dan prasarana sektor pertanian dan perkebunan sesuai dengan perjanjian kerjasama pengelolaan yang telah disepakati guna meminimalisir resiko yang terjadi. Pembagian hasil dibuat antara kedua belah pihak perlu diterapkan pengkajian ulang agar kedua belah pihak memahami tanggung jawab, hak serta kewajiban masing-masing sebagai pihak yang melakukan kerjasama. Pengembangan manajemen profesional, sarana serta berbagai inovasi ide baru turut diciptakan dan dikembangkan oleh pengelola untuk meningkatkan hasil produktivitas pertanian dan perkebunan.

Penerapan kebijakan memiliki sasaran-sasaran yang akan dicapai dan berdasarkan data di atas serta penjeleasan diketahui bahwa sasaran perda tercapai sehingga diketahui bahwa penerapan kebijakan (Permentan) tersebut efektif dimana berjalan sesuai arah dan sasaran yang dicapai. Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung menjelaskan bahwa dalam UU mengenai pejabat eselon diungkapkan bahwa pembagian tugas ini dilakukan untuk memudahkan pemerintah pusat untuk fokus dalam menganalisa berbagai potensi yang ada pada

institusi terkait dengan memberikan kewenangan pada masing-masing pihak pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung masing-masing wilayah agar dikembangkan dengan maksimal kemudian pihak Pemerintah Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung membantu secara global melalui berbagai fasilitas, infrastruktur, pendanaan baik dari masyarakat lokal maupun luar daerah sehingga memudahkan untuk proses branding atau proses pengenalan berbagai potensi pertanian dan perkebunan di Tana Tidung dalam berbagai sektor khususnya industri hasil pertanian dan perkebunan. Khusus sektor pertanian dan perkebunan berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa terdapat berbagai prestasi yang dicapai oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung baik lokal maupun nasional dimana hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan jumlah hasil produktivitas pertanian dan perkebunan. Kerjasama antara Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dan Pihak BUMN serta masyarakat menunjukkan bahwa Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung berhasil menunjukkan hasil dengan meningkatkan hasil produktivitas pertanian dan perkebunan sehingga berperan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Hasil beriktunya yakni adanya penambahan proyek kerjasama pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur waduk sebagai irigasi, penyuluhan serta perawatan bibit antara Pihak BUMN ,Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung.

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung maupun Bupati yang bertanggung jawab dalam mengelola bahwa pendapatan hasil pertanian dan perkebunan sekitar wilayah sektor pertanian dan perkebunan mengalami

peningkatan, baik yang menjual hasil pertanian dan perkebunan dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan di sekitar pertanian dan perkebunan. Fasilitas yang dibangun pada kawasan pertanian dan perkebunan dengan berbagai fasilitas pendukung yang dapat digunakan untuk pendukung produktivitas pertanian dan perkebunan menunjukkan hasil pertanian dan perkebunan serta masyarakat setempat puas dengan perbaikan serta pengembangan infrastruktur.

Penerapan implementasi Permentan Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung disebabkan oleh berbagai faktor volume beban kerja yang cukup besar dan bertambah namun keuangan daerah masih minim untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung. Beban kerja tersebut antara lain terkait dengan pengembangan kawasan sektor pertanian dan perkebunan di Kab Tana Tidung dimana belum tentu berdampak pada perubahan baik secara psikis maupun fisik. Pembangunan waduk, kemudahan fasilitas pertanian dan perkebunan serta akses perawatan, pengelolaan bibit, dan adanya tempat penjualan hasil pertanian dan perkebunan yang mudah menyebabkan adanya perubahan dimana banyaknya jumlah hasil pertanian dan perkebunan sehingga diperlukan manajemen pengelolaan yang baik dari pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dengan pihak masyarakat setempat yang dipimpin oleh Bupati. Petani sekitar dan Bupati cenderung mampu bekerjasama dengan baik dan beradaptasi dengan baik dengan berbagai perubahan terkait penerapan kebijakan Perangkat Daerah khususnya di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung untuk membantu pada staff Dinas disebabkan volume beban kerja khususnya pada pengembangan sektor

pertanian dan perkebunan. Masyarakat dan Bupati memahami dengan baik bahwa penerapan peraturan perangkat daerah ini ditujukan agar kinerja pada staf Dinas Pertanian dan Perkebunan menjadi lebih efektif serta efisien dan hal ini juga ditujukan untuk meningkatkan pencapaian sektor pertanian dan perkebunan sehingga perekonomian warga setempat sehingga aktivitas ekonomi bertambah ramai dengan memanfaatkan berbagai potensi wilayah yang ada. Kerjasama yang baik atau koordinasi dengan manajemen antara pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Proses koordinasi yang dilakukan oleh pihak pusat dan pihak lokal untuk mengatur berbagai sektor industri dimana proses pengaturan dan pengelolaan manajemen yang baik sehingga berdampak pada perencanaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan keadaan lapangan. Berbagai sektor pertanian dan perkebunan saat ini mulai digali potensinya untuk terus dikembangkan guna meningkatkan perekonomian warga maupun daerah.

Pemerintah Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dengan mengulas berbagai pendapat yang dirasakan oleh staff Dinas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dengan meminta pendapat mengenai perubahan struktur organisasi serta dampaknya pada kinerja, analisis beban kerja serta hasil target yang dicapai melalui berbagai upaya oleh Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung pada wilayah masing-masing di berbagai kawasan sektor pertanian dan perkebunan di seluruh kabupaten. Hal ini dinilai sebagai salah satu usaha dan kiat dari pihak pemerintah dalam melakukan efisiensi struktur organisasi serta birokrasi yakni menggunakan dan memanfaatkan kerjasama dengan BUMN sebagai sarana alternatif penyelesaian berbagai proyek

daerah terkait pembangunan fasilitas sektor pertanian dan perkebunan agar produktivitas hasil pertanian dan perkebunan semakin baik dan meningkatkan tiap periodenya. Sektor pertanian dan perkebunan merupakan potensi dan hal utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Potensi ini dinilai bisa menjual dan dapat dijadikan salah satu bentuk *brand personality* yang dapat ditawarkan pada skala nasional sebagai salah satu wilayah penyedia bahan pangan nasional. *Brand personality* ini tidak hanya dikaitkan dengan sektor industri pertanian dan perkebunan saja namun lebih dari itu juga dari sisi industri lain yang dimiliki pemerintah dimana dinilai paling baik secara nasional mengenai nilai yang dimiliki yang dapat dijadikan *brand personality* Kab. Tana Tidung. Jajaran pemerintah berusaha dengan menguatkan struktur organisasi khususnya pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung melalui salah satu lokasi industri pertanian dan perkebunan agar dikenal secara luas. Hal ini membantu proses pengenalan branding secara *intangible* melalui potensi sektor pertanian dan perkebunan yang ditanamkan dan dimiliki untuk dikembangkan dan diberbagai lokasi di kota lain di Tana Tidung terdapat produk hasil pertanian dan perkebunan yang dikembangkan sehingga mampu menjadi ikon wilayah tersebut.

Pengembangan berbagai sektor pertanian dan perkebunan sebagai salah satu analisis beban kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung tidak hanya pada sektor pertanian dan perkebunan namun pengembangan sektor lain yakni usaha masyarakat yakni ekonomi, perhubungan dan berbagai fasilitas lain merupakan salah satu yang terbaik hingga mendapat penghargaan nasional dimana hal ini merupakan salah satu proses *brand personality* dari sisi penghasil pertanian

dan perkebunan terbaik dan terbesar dengan potensi maksimal yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini yang kemudian menginspirasi berbagai pihak lain khususnya kawasan pertanian dan perkebunan lain di Tana Tidung untuk menjadikan kawasan pertanian dan perkebunan yang berhasil sebagai percontohan melihat berbagai aspek yang berhasil dikembangkan dan dimiliki dinilai memiliki keunggulan. Karakter masyarakat khususnya petani di Tana Tidung yang dinilai mudah untuk berpartisipasi dianggap memberikan kemudahan Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung serta Bupati dalam menerapkan inovasi baru sehingga berbagai proses sistem inovasi dalam hal khususnya pengembangan sektor industri pertanian dan perkebunan menjadi mudah untuk dilakukan dan dikembangkan. Proses berikutnya dalam Permentan ini yakni Pemerintah Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung setempat dituntut untuk menghasilkan kinerja lebih yang tidak hanya sekedar administratif atau birokrasi yakni dengan mendemonstrasikan keunggulan dari suatu *brand* hasil pertanian dan perkebunan dan perbedaannya dari kawasan hasil pertanian dan perkebunan lain yang dilihat dari berbagai potensi. Hal ini menunjukkan sebuah cara bagaimana pihak petani tertarik dan memandang sebuah ciri khas wilayah atau kawasan tertentu yang dianggap berbeda dengan wilayah lain dilihat dari sisi sektor hasil pertanian dan perkebunan yang dihasilkan.

Berbagai pihak yang terlibat dalam proses yang mendukung penerapan peraturan baru terkait perangkat daerah menjelaskan bahwa pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung telah berusaha secara optimal dalam rangka mengimplementasikan Permentan walaupun masih perlu pembenahan dan

penataan secara terus menerus. Hal ini menjelaskan bahwa pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung telah menanamkan persepsi pada posisi sebagai lokasi dengan sektor pertanian dan perkebunan dan perkebunan yang berpotensi untuk dikembangkan dimana tidak dapat ditemukan pada wilayah lain selain di Tana Tidung dalam tugas pejabat eselon sebagai penentu kebijakan publik khususnya di sektor pertanian. Berdasarkan wawancara tersebut dijelaskan bahwa pemerintah pusat membantu mendorong untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan masing-masing wilayah namun kewenangan tetap ada pada keputusan masing-masing pejabat di wilayah masing-masing wilayah tersebut untuk proses pengembangan. Tiap masing-masing wilayah atau daerah menginginkan potensi sektor pertanian dan perkebunan berkembang namun hal tersebut harus disesuaikan dengan *image* yang ingin dibangun. Berbagai potensi dari berbagai sektor pertanian dan perkebunan yang ada secara keseluruhan di Tana Tidung disebabkan komponen masyarakat dengan kultural yang begitu beragam sehingga berbagai potensi yang ada harus dikembangkan dan dimaksimalkan sebaik mungkin. Proses untuk menjadi maksimal tentu harus didukung dari sisi kemajuan teknologi sehingga potensi itu juga dinilai.

Identitas pada suatu wilayah memungkinkan sebuah lokasi menjadi berbeda dari tempat lain yang menjadi pesaingnya Pencarian identitas adalah langkah pertama dalam pembentukan citra sebuah lokasi. Identitas serta potensi wilayah Tana Tidung dalam sektor pertanian diharapkan mampu cukup menggambarkan secara keseluruhan identitas meskipun belum mampu secara global untuk keseluruhan wilayah Tana Tidung sebab masing-masing wilayah memiliki potensi

masing-masing dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda. Pada strategi *brand identity* ini diketahui diberlakukan kerjasama dimana pemerintah lokal tersebut diberi tugas masing-masing untuk bekerjasama dalam rangka pengembangan, penjagaan serta pelestarian kawasan sektor pertanian dan perkebunan wilayah tersebut. Strategi dalam hal adanya pembangunan terkait perekonomian sektor pertanian dan perkebunan yakni kemudahan fasilitas, perawatan, penjualan hasil pertanian dan sebagainya hal ini tentu mempermudah para petani untuk mendapatkan berbagai fasilitas selama hingga hasil didapatkan. Pemerintah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung berusaha melakukan *brand identity* kawasan pertanian dan perkebunan di Tana Tidung melalui penanaman sistem kerja budaya organisasi sesuai implemtasi Permentan dengan pencapaian target, tugas serta hasil kerja yang diberikan. Aturan yang sesuai tugas yang dijelaskan pada Permentan menunjukkan bagian dari budaya organisasi. Budaya organisasi sangat mempengaruhi implemtasi peraturan tersebut karena keterkaitan dengan nilai-nilai yang dianut dalam organisasi terutama komitmen dari masing-masing pegawai.staf untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing individu dengan baik. Budaya organisasi yang baik harus terus dibangun demi terlaksananya pencapaian target kinerja secara efektif dan efisien bagi masyarakat.

Prospek Tana Tidung sebagai kawasan wilayah pertanian dan perkebunan yang maju dan berkembang dapat diprediksi sehingga memerlukan kerjasama yang baik dari pihak pemerintah dimana merupakan salah satu bentuk strategi pengembangan untuk mempermudah pengembangan akses fasilitas yang ada di

lokasi sektor pertanian dan perkebunan maupun sektor industri lain. Strategi turut melibatkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik agar Tana Tidung lebih dulu dikenal dan mampu menarik perhatian atas kinerja pemerintahan yang baik. Pemerintah dengan strategi jaminan keamanan dan stabilitas serta adanya fasilitas dasar penunjang diusahakan agar investor bersedia bekerjasama untuk membangun Tana Tidung dari berbagai sektor. Proses kerjasama yang baik harus dibangun dari berbagai sektor dari berbagai bidang antara keseluruhan jajaran pemerintahan di berbagai bidang kedinasan dan investor agar terbangun sebuah sistem yang saling mendukung sehingga strategi pengembangan *brand identity* dapat terlaksana dengan maksimal Sektor yang diunggulkan dan berpotensi tidak hanya di bidang pertanian dan perkebunan namun lebih dari itu ada sektor lain yang berpotensi menjadi *brand*. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mengadakan efisiensi struktural organisasi melalui berbagai perangkat daerah yang diterapkan sebagai usaha maksimalisasi strategi berbagai pencapaian dalam rangka meningkatkan pembangunan perekonomian dengan melibatkan pihak luar pemerintah yakni swasta atau masyarakat. Hal ini merupakan kesempatan untuk menarik minat investor asing agar mau bekerjasama untuk membangun berbagai potensi baru yang ada. Berikut rincian adanya hasil dari sistem tata kelola pemerintahan yang menerapkan Permentan dalam mewujudkan *good governance* agar ketahanan pangan terwujud sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rencana, Target dan Pencapaian Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No10/Permentan/OT.010/4/2017

No	Rencana Kerja Perangkat Daerah	Program (Budaya Organisasi)	Hasil
1	Meningkatkan Produktivitas, Nilai Tambah dan daya saing komoditi, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan 2. Kegiatan pelatihan dan pelaku agribisnis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pelatihan bagi kelompok Tani 2. Terlaksananya pelatihan perlindungan penyebaran OPT pangan, hortikultura dan perkebunan
2.	Meningkatkan pertumbuhan kelompok tani dan kemampuan, kemandirian petani serta pelaku agribisnis lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan data statistik produk pangan, hortikultura dan perkebunan 2. Peningkatan kemampuan lembaga petani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya penyusunan dokumen data statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 2. Terlaksananya penyusunan perwilayahan komoditas
3.	Meningkatkan sarana, prasarana dan fasilitas pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana produksi pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pemeliharaan gudang 2. Tersedianya alat alsintan (paket pengembangan produksi pertanian) 3. Tersedianya fasilitas pengolahan tanah, alsinta pompa air
4.	Meningkatkan nilai bisnis serta penjualan hasil pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi atas hasil produk unggulan pertanian daerah 2. Pengembangan mutu dan standarisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya promosi tanaman unggulan daerah melalui penyebaran informasi pertanian 2. Terlaksananya pembinaan mutu, keamanan pangan serta sertifikasi pangan organik

Pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung telah berusaha secara optimal dalam rangka mengimplementasikan Permentan walaupun masih perlu pembenahan dan penataan secara terus menerus. Hal ini menjelaskan bahwa pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung telah menanamkan persepsi pada posisi sebagai lokasi dengan sektor pertanian dan perkebunan dan perkebunan yang berpotensi untuk dikembangkan dimana tidak dapat ditemukan pada wilayah lain selain di Tana Tidung dalam tugas pejabat eselon sebagai penentu kebijakan publik khususnya di sektor pertanian. Berdasarkan wawancara tersebut dijelaskan bahwa pemerintah pusat membantu mendorong untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan masing-masing wilayah namun kewenangan tetap ada pada keputusan masing-masing pejabat di wilayah masing-masing wilayah tersebut untuk proses pengembangan. Tiap masing-masing wilayah atau daerah menginginkan potensi sektor pertanian dan perkebunan berkembang namun hal tersebut harus disesuaikan dengan *image* yang ingin dibangun. Berbagai potensi dari berbagai sektor pertanian dan perkebunan yang ada secara keseluruhan di Tana Tidung disebabkan komponen masyarakat dengan kultural yang begitu beragam sehingga berbagai potensi yang ada harus dikembangkan dan dimaksimalkan sebaik mungkin. Proses untuk menjadi maksimal tentu harus didukung dari sisi kemajuan teknologi sehingga potensi itu juga dinilai.

Aturan yang sesuai tugas yang dijelaskan pada Permentan menunjukkan bagian dari budaya organisasi. Budaya organisasi sangat mempengaruhi impelentasi peraturan tersebut karena keterkaitan dengan nilai-nilai yang dianut

dalam organisasi terutama komitmen dari masing-masing pegawai.staf untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing individu dengan baik. Budaya organisasi yang baik harus terus dibangun demi terlaksananya pencapaian target kinerja secara efektif dan efisien bagi masyarakat. Prospek Tana Tidung sebagai kawasan wilayah pertanian dan perkebunan yang maju dan berkembang dapat diprediksi sehingga memerlukan kerjasama yang baik dari pihak pemerintah dimana merupakan salah satu bentuk strategi pengembangan untuk mempermudah pengembangan akses fasilitas yang ada di lokasi sektor pertanian dan perkebunan maupun sektor industri lain. Strategi turut melibatkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik agar Tana Tidung lebih dulu dikenal dan mampu menarik perhatian atas kinerja pemerintahan yang baik. Pemerintah dengan strategi jaminan keamanan dan stabilitas serta adanya fasilitas dasar penunjang diusahakan agar investor bersedia bekerjasama untuk membangun Tana Tidung dari berbagai sektor. Proses kerjasama yang baik harus dibangun dari berbagai sektor dari berbagai bidang antara keseluruhan jajaran pemerintahan di berbagai bidang kedinasan dan investor agar terbangun sebuah sistem yang saling mendukung sehingga strategi pengembangan dengan maksimal. Sektor yang diunggulkan dan berpotensi tidak hanya di bidang pertanian dan perkebunan namun lebih dari itu ada sektor lain yang berpotensi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mengadakan efisiensi struktural organisasi melalui berbagai perangkat daerah yang diterapkan sebagai usaha maksimalisasi strategi berbagai pencapaian dalam rangka meningkatkan pembangunan perekonomian dengan melibatkan pihak luar pemerintah yakni swasta atau masyarakat. Hal ini merupakan kesempatan

untuk menarik minat investor asing agar mau bekerjasama untuk membangun berbagai potensi baru yang ada.

proses implementasi kebijakan antara lain pembagian tugas yang belum merata dan proporsional di tingkat staff sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung karena belum tersedian analisis beban kerja dinas sehingga menimbulkan berbagai kesulitan. Kesulitan dalam mengawasi proyek, perbedaan persepsi dengan pihak swasta, implementasi proyek yang tidak sesuai kebijakan, prosedur dan tujuan. Minimnya kemampuan kapasitas karyawan yang tersedia menghambat proses selama kerjasama dilakukan. Rumitnya birokrasi dengan berbagai prosedur yang harus dilalui dalam setiap keputusan yang diambil terkait pengadaan fasilitas serta biaya investasi yang minim. Peningkatan sarana dan prasarana sektor pertanian dan perkebunan sesuai dengan perjanjian kerjasama pengelolaan yang telah disepakati guna meminimalisir resiko yang terjadi. Pembagian hasil dibuat antara kedua belah pihak perlu diterapkan pengkajian ulang agar kedua belah pihak memahami tanggung jawab, hak serta kewajiban masing-masing sebagai pihak yang melakukan kerjasama. Pengembangan manajemen profesional, sarana serta berbagai inovasi ide baru turut diciptakan dan dikembangkan oleh pengelola untuk meningkatkan hasil produktivitas pertanian dan perkebunan.

Penerapan kebijakan memiliki sasaran-sasaran yang akan dicapai dan berdasarkan data di atas serta penjeleasan diketahui bahwa sasaran perda tercapai sehingga diketahui bahwa penerapan kebijakan (Permentan) tersebut efektif dimana berjalan sesuai arah dan sasaran yang dicapai. Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan

Perikanan Kab. Tana Tidung menjelaskan bahwa dalam UU mengenai pejabat eselon diungkapkan bahwa pembagian tugas ini dilakukan untuk memudahkan pemerintah pusat untuk fokus dalam menganalisa berbagai potensi yang ada pada institusi terkait dengan memberikan kewenangan pada masing-masing pihak pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung masing-masing wilayah agar dikembangkan dengan maksimal kemudian pihak Pemerintah Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung membantu secara global melalui berbagai fasilitas, infrastruktur, pendanaan baik dari masyarakat lokal maupun luar daerah sehingga memudahkan untuk proses branding atau proses pengenalan berbagai potensi pertanian dan perkebunan di Tana Tidung dalam berbagai sektor khususnya industri hasil pertanian dan perkebunan. Khusus sektor pertanian dan perkebunan berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa terdapat berbagai prestasi yang dicapai oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung baik lokal maupun nasional dimana hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan jumlah hasil produktivitas pertanian dan perkebunan. Kerjasama antara Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dan Pihak BUMN serta masyarakat menunjukkan bahwa Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung berhasil menunjukkan hasil dengan meningkatkan hasil produktivitas pertanian dan perkebunan sehingga berperan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Hasil beriktunya yakni adanya penambahan proyek kerjasama pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur waduk sebagai irigasi, penyuluhan serta perawatan bibit antara Pihak BUMN Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung.

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung maupun Bupati yang bertanggung jawab dalam mengelola bahwa pendapatan hasil pertanian dan perkebunan sekitar wilayah sektor pertanian dan perkebunan mengalami peningkatan, baik yang menjual hasil pertanian dan perkebunan dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan di sekitar pertanian dan perkebunan. Fasilitas yang dibangun pada kawasan pertanian dan perkebunan dengan berbagai fasilitas pendukung yang dapat digunakan untuk pendukung produktivitas pertanian dan perkebunan menunjukkan hasil pertanian dan perkebunan serta masyarakat setempat puas dengan perbaikan serta pengembangan infrastruktur.

Penerapan implementasi Permentan Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung disebabkan oleh berbagai faktor volume beban kerja yang cukup besar dan bertambah namun keuangan daerah masih minim untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung. Beban kerja tersebut antara lain terkait dengan pengembangan kawasan sektor pertanian dan perkebunan di Kab Tana Tidung dimana belum tentu berdampak pada perubahan baik secara psikis maupun fisik. Pembangunan waduk, kemudahan fasilitas pertanian dan perkebunan serta akses perawatan, pengelolaan bibit, dan adanya tempat penjualan hasil pertanian dan perkebunan yang mudah menyebabkan adanya perubahan dimana banyaknya jumlah hasil pertanian dan perkebunan sehingga diperlukan manajemen pengelolaan yang baik dari pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dengan pihak masyarakat setempat yang dipimpin oleh Bupati. Petani sekitar dan Bupati cenderung mampu bekerjasama dengan baik dan beradaptasi dengan baik dengan

berbagai perubahan terkait penerapan kebijakan Perangkat Daerah khususnya di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung untuk membantu pada staff Dinas disebabkan volume beban kerja khususnya pada pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Masyarakat dan Bupati memahami dengan baik bahwa penerapan peraturan perangkat daerah ini ditujukan agar kinerja pada staf Dinas Pertanian dan Perkebunan menjadi lebih efektif serta efisien dan hal ini juga ditujukan untuk meningkatkan pencapaian sektor pertanian dan perkebunan sehingga perekonomian warga setempat sehingga aktivitas ekonomi bertambah ramai dengan memanfaatkan berbagai potensi wilayah yang ada. Kerjasama yang baik atau koordinasi dengan manajemen antara pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Proses koordinasi yang dilakukan oleh pihak pusat dan pihak lokal untuk mengatur berbagai sektor industri dimana proses pengaturan dan pengelolaan manajemen yang baik sehingga berdampak pada perencanaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan keadaan lapangan. Berbagai sektor pertanian dan perkebunan saat ini mulai digali potensinya untuk terus dikembangkan guna meningkatkan perekonomian warga maupun daerah. Pemerintah Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dengan mengulas berbagai pendapat yang dirasakan oleh staff Dinas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dengan meminta pendapat mengenai perubahan struktur organisasi serta dampaknya pada kinerja, analisis beban kerja serta hasil target yang dicapa melalui berbagai upaya oleh Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung pada wilayah masing-masing di berbagai kawasan sektor pertanian dan perkebunan di seluruh kabupaten. Hal ini

dinilai sebagai salah satu usaha dan kiat dari pihak pemerintah dalam melakukan efisiensi struktur organisasi serta birokrasi

4.3 *Good Governance* di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan

Pengelolaan pemerintahan merupakan salah satu bentuk usaha dari pemerintah Dinas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung khususnya Pertanian dengan pihak yang ditunjuk Pemerintah untuk mengelola tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutamakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara pemegang kebijakan di Dinas Pertanian. Narasumber menyebutkan *governance* pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan dinilai sudah diterapkan dengan maksimal meskipun banyak terdapat hal yang harus dievaluasi sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sector negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian *good governance* ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. *Governance* mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang berkerja pada tingkat yang berbeda.

Proses pengambilan keputusan dalam mencapai *good governance* dan proses yang mana keputusan itu diimplementasikan, maka analisis *governance* difokuskan pada faktor-faktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasinya serta struktur formal dan informal yang disusun untuk

mendatangkan implementasi keputusan.. *Governance* pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti *coorporate governance, international governance, national governance* dan *local governance*. Penerapan proses ini telah menunjukkan proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut sebagai bentuk mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal.

Pihak Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung mampu membentuk manajemen pembangunan yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *Agent of Change* dari suatu masyarakat berkembang/developing di dalam negara berkembang. *Agent of change* karena perubahan yang dikehendakinya, menjadi *planned change* (perubahan yang berencana), maka disebut juga *Agent of Development*. *Agent of Development* diartikan sebagai pendorong proses pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program, proyek-proyek, dan peran perencanaan dalam anggaran khususnya dalam bidang pertanian. Keberhasilan tersebut diketahui dengan hasil sebagai berikut sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rumusan yang lebih spesifik dan

terukur, yaitu berupa Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2017 realisasi anggaran sebagai bentuk dari hasil kinerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kabupaten Tana Tidung**

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
2015	28.019.725.700	21.295.656.073	76%
2016	15.765.853.600	11.997.998.205	76,10%
2017	10.607.025.000	9.943.020.960	99,35%

Sumber : LAKIP 2017

Berdasarkan Pergub mengenai Perjanjian Kinerja SKPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 dimana masing-masing Pemerintahan tiap Kabupaten memiliki perjanjian dan target kerja masing-masing sehingga hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi hal ini sebagai salah satu bentuk keberhasilan penerapan *good governance* khususnya terkait dengan aspek transparansi.

Aspek lain yakni partisipasi ditunjukkan dengan menyediakan berbagai fasilitas pertanian untuk memperoleh keuntungan guna meningkatkan pendapatan produktivitas pertanian. Pemerintah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung bekerja sama dengan pihak swasta khususnya masyarakat sekitar dimana bertujuan untuk menyediakan sarana prasarana dan fasilitas yang mendukung kegiatan sektor pertanian dimuali dari peralatan canggih yang membutuhkan biaya besar seperti proses pembibitan hingga alat atau fasilitas dengan harga terjangkau seperti sistem irigasi sesuai dengan kebutuhan lapangan

terkait dengan pertanian dengan memaksimalkan potensi pembangunan lahan dengan mengembangkan fasilitas yang ada untuk meningkatkan pendapatan sektor pertanian sehingga terdapat maksimalisasi terhadap pembangunan beberapa fasilitas daerah yang bekerja sama dengan pihak Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung maupun masyarakat secara mandiri

Aspek penerapan hukum terlihat dari penerapan berbagai kesepakatan kerjasama yang dilakukan pihak Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung yang berkaitan dengan pengadaan barang, peralatan, kerjasama dengan pihak penelii lembaga institusi baik pemerintah maupun swasta dijelaskan secara terikat dan berdasarkan atas perjanjian hukum sehingga minim atau mencegah tindakan KKN. Kerjasama pihak swasta dengan Pemerintah diketahui pihak swasta dalam hal ini yakni pengadaan barang, kerjasama penelitian bibit unggul dimiliki kemudian mengadakan studi perbandingan untuk mengunjungi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung. Pemerintah memberikan wewenang untuk melakukan berbagai kegiatan untuk memaksimalkan potensi sektor pertanian dengan berbagai cara seperti :

1. Menggunakan lokasi pertanian sebagai kawasan sektor industri pangan untuk peningkatan potensi dengan adanya studi perbandingan dari berbagai pihak seperti peneliti swasta maupun Dinas Pertanian Daerah lain untuk membantu mengembangkan potensi pertanian.
2. Membangun dan mengelola berbagai fasilitas yang ada di kawasan pertanian untuk meningkatkan sektor pertanian dan menambah daya kapabilitas mekanisme pertanian guna meningkatkan pendapatan daerah .

3. Melakukan kerjasama dengan UKM terkait penyediaan fasilitas perdagangan hasil pertanian dan berbagai hasil pertanian lainnya.
4. Melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan tujuan kerjasama sesuai kesepakatan penerapan hukum yang berlaku.

Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dilandasi dengan dasar hukum sehingga birokrasi berjalan dengan batasan atau koridor tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

Aspek berikutnya yakni responsivitas. Sebagai salah satu bentuk responsivitas dalam birokrasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung terhadap kendala pengembangan sektor pertanian yakni ditunjukkan dengan salah satu upaya pemerintah khususnya Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dalam rangka penerapan peraturan daerah terkait pengembangan potensi tersebut dilakukan melalui promosi hasil produksi, peningkatan fasilitas pertanian mulai dari bibit unggul, alat dalam membantu pengolahan tanah, penanaman, perawatan, hingga panen dan pemasaran atau penjualan hasil panen petani yang dinilai sangat diperhatikan dengan sarana serta prasarana dimana hal tersebut dibangun dengan adanya kerjasama antara pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dengan mengusahakan menarik investor pertanian melalui berbagai promosi tersebut dan pemberian berbagai sarana prasarana yang mendukung akses peningkatan produktivitas.

Aspek berikutnya yakni orientasi. Hal ini berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai yakni adanya mekanisme sistem pertanian yang mendukung pertanian serta dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Pencapaian orientasi ini dilakukan

pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung melalui pola kerjasama antara pengelola dalam hal ini Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung yang mengajak warga (petani) dilakukan untuk membantu merawat hasil pembangunan infrastruktur fasilitas seperti pelabuhan khusus untuk berlabuh kapal sebagai sarana memudahkan dalam hal transportasi. Pihak Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung memiliki orientasi bahwa berbagai penerapan kebijakan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dana penyediaan berbagai fasilitas tersebut diperoleh dari sebagian anggaran pemerintah dan sebagian anggaran swasta yakni investor dengan salah satu fasilitas seperti kemudahan petani mengakses Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung terkait pemberian bantuan fasilitas maupun alat memudahkan sistem tata pemerintahan yang ditujukan pada peningkatan produktivitas pertanian berjalan dengan lancar sebagai bentuk perwujudan sistem mekanisme pertanian yang baik.

Aspek keadilan sebagai bentuk dari *good governance* terlihat dari upaya Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung dalam merespons berbagai upaya yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi daerah melalui pembangunan fasilitas pertanian maupun kapabilitas pegawai dan beberapa sarana pendukung lain. Kemampuan pemerintah dari segi dana maupun kemampuan masih minim sehingga diperlukan peran swasta untuk membantu mencapai peningkatan pembangunan sektor pertanian daerah Kab Tana Tidung menjadi lebih baik dan lebih berkembang. Berbagai penyediaan birokrasi, peralatan, pembibitan yang disediakan pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab.

Tana Tidung diusahakan dirasakan oleh berbagai pihak khususnya petani dari berbagai wilayah di Kab Tana Tidung sehingga menunjukkan adanya keadilan.

Aspek efektivitas dalam penerapan *good governance* ditunjukkan dengan hasil adanya peluang atau potensi Kab Tana Tidung sebagai salah satu kabupaten potensi yang berkembang di Kalimantan Utara melalui salah satu ikon daerah pertanian yang turut menyumbang hasil sebagai usaha swasembada pangan khususnya di Wilayah Kalimantan Utara. Hasil dari penerapan efektivitas sistem pemerintahan yang menunjukkan *good governance* yakni dengan adanya hasil perencanaan pembangunan berbagai macam kawasan untuk meningkatkan kenyamanan serta kesejahteraan masyarakat sesuai dengan bidang pertanian. Minimnya dana anggaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur maka perlu kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta. Kerjasama ini didasari atas hubungan antar pelaku yang betumpu pada ikatan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan. Pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung menjelaskan bahwa berbagai upaya dalam rangka penerapan tata kelola pemerintahan khususnya sektor pertanian di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung saat ini telah membuahkan hasil. Hal ini hasil kerjasama yang ditujukan untuk pembangunan serta pengelolaan infrastruktur sektor pertanian agar menjadi lebih optimal sesuai wawancara berikut :

“Sesuai perjanjian perda tentang pengembangan sektor pertanian melalui mekanisme sistem pertanian, kami berusaha untuk memperbaiki berbagai fasilitas yang ada khususnya masalah yang kerap terjadi seperti bibit, pupuk, iklim serta cuaca, hingga penjualan hasil pertanian. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung kerap menghubungi investor maupun pihak pasar sebagai penjual hasil panen yang sering menjual hasil pertanian di berbagai wilayah di Kalimantan Utara. Kami sebagai pihak Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan memang tidak memiliki hak untuk mengatur pasar

namun ada seksi produksi, pengolahan dan pemasaran hasil yang turut membantu dalam mengelola atau mencari pasar sehingga pertanian wilayah ini produktif”(Kepala Bidang Pertanian) ”

Aspek berikutnya terkait dengan Akuntabilitas dengan salah satu contoh adanya pertanggungjawaban (akuntabilitas) dari berbagai kerjasama atau kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung yakni minimnya kemampuan pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung untuk mengelola pemasaran maupun produksi hasil menyebabkan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung berusaha mencari pihak investor swasta untuk menjalin kerjasama agar berbagai hasil pertanian, infrastruktur pertanian dapat dikembangkan, bermanfaat dan tujuan utama dapat menambah pendapatan daerah di bidang pertanian sebagai anggaran tambahan pemasukan

Akibat dari otoritas yang diberikan pusat serta dana yang minim baik dari pusat maupun daerah mendorong pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung untuk bekerjasama membuka peluang serta kesempatan pihak swasta untuk turut berkontribusi dengan pemerintah membangun serta mengelola infrastruktur seperti bendungan, jalan lebar sebagai akses memudahkan hasil panen untuk diangkut. Pemerintah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung senantiasa memperhatikan berbagai lokasi kota serta tata perencanaan yang baik dengan memaksimalkan semua potensi wilayah yang ada dalam hal ini khususnya di bidang sektor pertanian yang menjadi salah satu wacana Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung untuk dikembangkan. Sesuai petikan wawancara berikut :

“ Kab Tana Tidung ini kan punya banyak hasil pertanian. Banyak sekali sektor jenis hasil pertanian yang harus digarap oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung jadi punya potensi yang bisa dikembangkan. Pemerintah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung ini kan punya tata rencana kebijakan yang disusun dengan pemetaan berbagai sektor yang dikembangkan salah satunya ya sektor peratanian baik ekonomi maupun perdagangan yang saling berkaitan. Kita dorong pihak swasta untuk ikut kontribusi buat pembangunan fasilitas infrastruktur, sarana serta prasarana, bendungan, jalan akses yang memudahkan dan khusus pengelolaan lahan kita minta bantu kepala desa dan warga sekitar yang memang antusias dengan berbagai program pengembangan lahan pertanian kita (Kepala Seksi Administrasi Sarana dan Prasarana)”

Keterlibatan pihak swasta dilakukan sesuai rencana Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung untuk menjadikan Kab Tana Tidung menjadi wilayah potensi pertanian dengan kelengkapan berbagai fasilitas yang ada. Berbagai kerjasama sebagai bentuk penerapan kebijakan dilaporkan program progress serta perkembangannya oleh pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung sebagai bentuk dari penerapan tata kelola pemerintah khususnya aspek akuntabilitas. Hal tersebut sesuai petikan wawancara berikut :

“Kami senantiasa memberikan laporan dari berbagai hal terkait proses penerapan mekanisme pertanian yang dilakukan agar dana dan hasil kerja yang dilakukan dapat diketahui secara jelas dan ketika terdapat berbagai kesalahan atau kekurangan dapat segera dievaluasi serta dipertanggung jawabkan. Pihak pemerintahan menjelaskan kekurangan yang ada pada pihak warga sekitar lokasi” (Kepala Seksi Administrasi Sarana dan Prasarana)

Aspek berikutnya terkait dengan strategi visi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung yakni meningkatkan pembangunan Kab Tana Tidung melalui Harmonisasi Dalam Pendayagunaan Potensi Sumber Daya Manusi, Sumber Daya Alam, Ekonomi Pro Rakyat, Budaya Lokal dan IPTEK Menuju Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkelanjutan. Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan hal ini salah satunya memantau kelemahan dan kelebihan yang

mungkin ada dan dapat dimaksimalkan dalam mewujudkan hal tersebut. Pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung memberikan pemantauan secara berkala dengan memperhatikan kondisi petani untuk dikembangkan kemudian hasil pertanian dari pengelolaan dan pengembangan hasil pertanian tersebut agar menghasilkan produktivitas maksimal minimal mandiri mampu memebuhi kebutuhan wilayah Tana Tidung secara keseluruhan sehingga tidak mendatangkan hasil pertanian dari wilayah lain bahkan mampu menyediakan stock hasil pertanian pada wilayah lain khususnya di Kalimantan.

Berkaitan dengan hasil kinerja pegawai yang dilakukan melalui penerapan Permentan No10/Permentan/OT.010/4/2017 dapat ditinjau dari beberapa aspek yakni kuantitas kerja dimana hasil yang diperoleh atau didapatkan oleh pegawai dikaitkan dengan pencapaian tujuan yang harus diperoleh insititusi pemerintahan. Aspek kualitas kerja ditinjau dari manfaat serta nilai hasil kinerja pegawai pemerintahan yang berhaisl diciptakan khususnya terkait dengan kelembagaan pertanian yang berfungsi secara optimal sehingga mampu membantu serta meningkatkan proses kerja pegawai pemerintah. Aspek berikutnya yang dinilai yakni ketepatan waktu, bahwa berbagai kinerja yang dijalankan oleh pegawai senantiasa diperhitungkan serta ada batasan waktu agar semua pekerjaan selesai dalam waku yang tepat dan tidak memakan waktu lama sehingga terjadi perlambatan kinerja dan berdampak pada lambatnya pencapaian tujuan oleh institusi. Aspek berikutnya yakni keterlibatan dikaitkan dengan peran serta partisipasi pegawai dalam menjalankan berbagai sistem pelayanan publik yang ditetapkan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berhasil

memberikan dampak serta hasil positif pada institusi pemerintahan sebagai lembaga pelayanan publik khususnya pada para petani. Aspek terakhir yakni kerjasama dimana sistem saling bekerja sama khususnya antar sesama rekan kerja maupun atasan dalam sistem pemerintahan penting dan mutlak dibutuhkan sebab tanpa kerjasama yang baik maka berbagai pencapaian hasil kerja serta tujuan institusi yang akan dicapai sulit untuk diwujudkan dalam waktu yang cepat.

Sasaran dari adanya penerapan *good governance* yakni menciptakan kinerja terbaik dengan hasil output pegawai dapat menyusun strategi pengembangan perangkat daerah baik dari sisi kualitas, efektivitas, efisiensi dan sebagainya, sasaran fokus pada pengembangan sumber daya manusia serta struktur organisasi, sasaran sesuai dengan beban kerja dengan prinsip penataan organisasi yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Pengelolaan serta pengembangan kualitas perangkat dalam struktur organisasi merupakan salah satu bentuk usaha dari pemerintah Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung untuk mengelola dengan menyediakan berbagai fasilitas pertanian dan perkebunan untuk memperoleh keuntungan guna meningkatkan pendapatan petani. Pemerintah Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung meningkatkan kemampuan pegawai dengan bekerja sama dengan pihak swasta khususnya masyarakat sekitar yakni petani dimana bertujuan untuk menyediakan sarana prasarana dan fasilitas yang mendukung perbaikan di bidang produktivitas pertanian dan perkebunan dengan memaksimalkan potensi pembangunan lahan dengan mengembangkan fasilitas yang ada untuk meningkatkan pendapatan Kab Tana Tidung sebagai bentuk adanya hasil pemerintahan yang baik dengan

menghasilkan kinerja terbaik sehingga terdapat maksimalisasi terhadap beberapa fasilitas daerah khususnya berkaitan dengan pertanian dan perkebunan yang bekerja sama dengan pihak swasta.

Dampak dari adanya penerapan sistem pemerintagan *good governance* pada pegawai khususnya perangkat daerah di Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung yakni adanya perubahan substansi pada Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung yakni penambahan tugas dan fungsi berupa urusan penyuluhan dimana sebelumnya ada penerapan peraturan baru merupakan tugas dan fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan dan kemudian dialihkan ke Dinas Pertanian dan Perkebunan. Pemerintah Kantor Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung sebagai bentuk perubahan atas penerapan peraturan tersebut berdampak pada penambahan tugas sehingga mengubah struktur organisasi dimana kemudian pihak Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung memberikan wewenang untuk melakukan berbagai kegiatan untuk memaksimalkan potensi wilayah pertanian dan perkebunan sebagai bentuk hasil kinerja terbaik dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hasil kinerja dari pegawai dengan diberlakukannya sistem tata kelola pemerintahan yang baik memberikan dampak pada output kinerja yang dihasilkan pegawai antara lain adanya rencana pencapaian sebagai berikut:

1. Menggunakan lokasi pertanian dan perkebunan sebagai kawasan pengembangan pertanian dan perkebunan untuk penelitian sebagai usaha meningkatkan produktifitas pertanian dan perkebunan

2. Membangun dan mengelola berbagai fasilitas pertanian dan perkebunan yang ada di kawasan lokasi pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan minat petani dan menambah wawasan petani guna meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan perkebunan daerah Kab. Tana Tidung
3. Melakukan kerjasama dengan KUD bagian penjualan hasil pertanian dan perkebunan terkait penyediaan fasilitas bibit, pemeliharaan dan berbagai kebutuhan pertanian dan perkebunan lainnya
4. Melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan tujuan kerjasama

Salah satu upaya pemerintah khususnya Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung dalam rangka penerapan peraturan daerah terkait sistem pemerintahan dengan tata kelola yang baik (*good governance*) tersebut dilakukan melalui pengelolaan struktur organisasi, penambahan tugas serta fungsi dan peningkatan fasilitas dengan sarana serta prasarana pertanian dan perkebunan dimana hal tersebut dibangun dengan adanya kerjasama antara pihak Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung dengan masyarakat melalui berbagai usaha penyuluhan pertanian dan perkebunan serta pemberian berbagai sarana prasarana yang mendukung produktivitas hasil pertanian dan perkebunan.

4.4 Kinerja Pegawai Khususnya Pejabat Eselon di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Tana Tidung

Pola hasil kinerja yang ditunjukkan pegawai Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung kerjasama dengan warga dan Bupati dilakukan untuk membantu pembangunan infrastruktur fasilitas seperti lokasi khusus untuk penyemaian bibit unggulan, pupuk yang berkualitas dan fasilitas irigasi. Dana

penyediaan berbagai fasilitas tersebut diperoleh dari sebagian anggaran pemerintah dan sebagian anggaran swasta yakni masyarakat yang sebagian petani dari hasil penjualan hasil pertanian dan perkebunan yang menguntungkan. Pola kerjasama ini sebagai dampak dari adanya perubahan organisasi secara struktur berupa adanya perampingan bidang kerja sesuai dengan bidang kerja. Berdasarkan hasil kinerja pada Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung masuk dalam Tipe A yang terdiri dari 4 bidang dan 4 UPTD dari semula 7 bidang dari 4 UPTD sehingga diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik dalam institusi agar mencapai kinerja yang maksimal.

Kinerja dikaitkan dengan beban kerja. Beban kerja yang bertambah ini didukung dengan berbagai upaya yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi daerah melalui pembangunan fasilitas pertanian dan perkebunan dan beberapa sarana pendukung lain. Kemampuan pemerintah dari segi dana maupun kemampuan masih minim sehingga diperlukan peran swasta untuk membantu mencapai peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan menjadi lebih baik dan lebih berkembang.

Kab. Tana Tidung sebagai salah satu wilayah yang berpotensi dalam bidang pertanian dan perkebunan sebagai salah satu wilayah yang dapat memberikan peran penting dalam ketahanan pangan nasional dimana saat ini merencanakan pembangunan berbagai macam waduk, bendungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan serta kesejahteraan masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing. Minimnya dana anggaran pemerintah merupakan salah satu kendala sehingga diperlukan tata kelola sistem pemerintahan yang baik untuk

memenuhi kebutuhan infrastruktur maka perlu kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta. Kerjasama ini didasari atas hubungan antar pelaku yang betumpu pada ikatan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan. Pihak Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung menjelaskan bahwa berbagai upaya dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan serta membuahakan hasil. Hal ini hasil kerjasama yang ditujukan untuk pembangunan serta pengelolaan infrastruktur agar menjadi lebih optimal dengan tidak mengabaikan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan hasil kinerja yang optimal.

Secara rinci terkait proses awal permulaan proses pihak Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung dalam rangka mengembangkan strategi jangka pendek adalah mengoptimalkan staf yang ada dalam melaksanakan tugas dan fungsi sambil tetap terus melakukan analisis beban kerja Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung berdasarkan volume dan beban kerja secara proporsional dengan melihat tingkat pendidikan, keahlian teknis dan sosial kultural. Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung terus melakukan koordinasi secara rutin baik vertikal maupun horizontal dengan berbagai pihak terkait Implementasi Peraturan guna menyediakan data pendukung volume beban kerja, tugas dan fungsi dinas yang dipakai untuk penentuan struktur maupun pelaksanaan tugas. Pihak Dinas Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung bekerja sama untuk mengembangkan pertanian dan perkebunan di Kab. Tana Tidung.

Sektor pertanian di Tana Tidung saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat di berbagai hal dengan penambahan berbagai target kerja sebagai wilayah yang ditargetkan sebagai penghasil terbesar hasil pertanian dan perkebunan. Pertambahan jumlah produktivitas hasil pertanian dan perkebunan tersebut mendorong pihak Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung dan Pengelola untuk senantiasa menambah jumlah fasilitas pendukung pertanian dan perkebunan yang ada. Kebutuhan infrastruktur pertanian dan perkebunan di KTT cukup besar dan kian meningkat seiring perkembangan teknologi serta komunikasi. Tugas dari unit kerja Eselon pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung dituntut mampu memberikan hasil dari pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan hasil kerjasama Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung dan Bupati berhasil membuka kesempatan bagi warga untuk bekerjasama mengelola lahan yang digunakan sebagai kawasan pertanian dan perkebunan dan berdasarkan ide dan sistem kerjasama yang dipaparkan.

Proses awal pembangunan fasilitas pun dilakukan melalui proses negosiasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan acara persiapan pembangunan waduk kemudian mulai dari waktu pengerjaan fasilitas, lama batasan waktu pembangunan, *quality* kontrol kinerja serta kondisi keuangan. Berbagai hal terkait dengan analisis resiko solusi ketika resiko terjadi menjadi hal yang dibahas dan dinegosiasikan dengan pihak yang terlibat. Ketika pihak Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tana Tidung setuju menunjuk Bupati dan beberapa warga sebagai pengelola pihak tersebut membahas terkait berbagai hal

yang ada dalam kerjasama, pelaksana pembangunan, pengawasan dan berbagai hal tersebut harus sesuai dengan tujuan serta dilaksanakan berdasarkan koridor yang tidak bertentangan dengan prosedur yang ditentukan. Kawasan pengembangan pertanian dan perkebunan tersebut untuk dikelola dan hasil keuntungan dibagikan pada Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tana Tidung sebagai tambahan pendapatan daerah.

Kendala yang masih terjadi dalam proses implementasi antara lain pembagian tugas yang belum merata dan proporsional di tingkat staff sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tana Tidung karena belum tersedian analisis beban kerja dinas sehingga menimbulkan berbagai kesulitan. Kesulitan dalam mengawasi proyek, perbedaan persepsi dengan pihak swasta, implementasi proyek yang tidak sesuai kebijakan, prosedur dan tujuan. Minimnya modal investasi yang tersedia menghambat proses selama kerjasama dilakukan. Rumitnya birokrasi dengan berbagai prosedur yang harus dilalui dalam setiap keputusan yang diambil terkait pengadaan fasilitas serta biaya investasi yang minim. Peningkatan sarana dan prasarana sektor pertanian dan perkebunan sesuai dengan perjanjian kerjasama pengelolaan yang telah disepakati guna meminimalisir resiko yang terjadi. Pembagian hasil dibuat antara kedua belah pihak perlu diterapkan pengkajian ulang agar kedua belah pihak memahami tanggung jawab, hak serta kewajiban masing-masing sebagai pihak yang melakukan kerjasama. Pengembangan manajemen profesional, sarana serta berbagai inovasi ide baru turut diciptakan dan dikembangkan oleh pengelola untuk meningkatkan hasil produktivitas pertanian dan perkebunan agar terjadi

peningkatan pendapatan. Berdasarkan data Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tana Tidung berikut hasil perkembangan jumlah hasil produktivitas pertanian dan perkebunan mengalami peningkatan

4.5 Ringkasan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No10/Permentan/OT.010/4/2017

Pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No10/Permentan/OT.010/4/2017 terkait dengan uraian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV lingkung Dinas Pertanian bahwa pada bagian sub kepegawaian memiliki uraian tugas pekerjaan yang meliputi tugas pekerjaan dengan rincian sebagai pengumpul data, pengolah informasi, menyusun kerangka acuan kegiatan serta menyajikan rencana kerja dengan hasil kerja berupa konsep kerja anggaran kepegawaian. Peraturan ini fokus pada point penting yang wajib dilakukan, dilaksanakan dan dikerjakan oleh pegawai sengan target kerja yang telah ditetapkan kemudian dievaluasi pada tiab sub pegawai sesuai dengan tugas masing-masing. Peraturan ini fokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan birokrasi kepegawaian khususnya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan benar sesuai peraturan yang ditetapkan. Target serta kinerja yang harus dicapai pada peraturan ini turut ditetapkan bagi masing-masing sub kepegawaian sebagai bahan dasar evaluasi serta penilaian kinerja aspek yang diperhatikan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No10/Permentan/OT.010/4/2017 berkaitan langsung dengan konsep rencana anggaran, kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kinerja pegawai, pendayagunaan pejabat fungsional, kegiatan kedinasan seperti penyuluhan dan penelitian

pertanian dan evaluasi organisasi pada tiap sub bagian kepegawaian yang bertugas pada Dinas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung sesuai dengan deskripsi tugas pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing sehingga pegawai difokuskan mampu mencapai target dan kinerja yang diharapkan sehingga membentuk tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada bagian program dan evaluasi dijelaskan bahwa pegawai dari bagian program memiliki tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta penyajian bahan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran penelitian, perekayasa dan pengembangan mekanisasi serta standarisasi dan pengujian alat dan mesin pertanian. Uraian tugas tersebut dikaitkan dengan penyiapan bahan penyusunan, rencana kerja dan anggaran berkaitan dengan mengumpulkan data serta informasi, mengolah data informasi, menyusun kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya dan rencana operasional kegiatan dan menyajikan rencana kerja dan anggaran serta KAK, RAB dan ROK. Hasil kerja yakni adanya konsep rencana kerja dan anggaran serta KAK, RAB dan ROK. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang di bidang penelitian, perekayasa dan pengembangan mekanisasi serta standarisasi dan pengujian alat dan mesin pertanian yang kegiatannya terdiri atas pengumpulan data serta pengolahan data, melakukan formulasi serta sinkronisasi penyusunan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang, melakukan penyusunan dan pembahasan konsep kebijakan serta melakukan penyiapan usulan hasil penyusunan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang. Berbagai kegiatan tersebut

dilakukan dalam berbagai lini bidang setiap bagian pegawai sesuai dengan aturan dan kebijakan Permentan.

4.6 Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No10/Permentan/OT.010/4/2017 dalam mewujudkan *Good Governance*

Kelebihan dari penerapan Kesulitan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No10/Permentan/OT.010/4/2017 dalam mewujudkan *Good Governance* yakni terdapat sistematis yang jelas bagi pegawai terkait dengan kebutuhan, pengembangan, kinerja, kedudukan, pencapaian target dengan adanya ketersediaan birokrasi jelas bagi pegawai dalam bekerja atau melaksanakan sebuah proyek khususnya pada pengembangan produksi pertanian, perawatan hingga pemasaran hasil dan dalam mengawasi hasil kinerja pegawai, mempertahankan agar hasilnya konsisten.

Kelemahan yakni kendala mengawasi fasilitas proyek, perbedaan persepsi dengan pihak swasta, implementasi proyek yang tidak sesuai kebijakan, prosedur dan tujuan. Minimnya modal investasi yang tersedia menghambat proses selama kerjasama dilakukan. Rumitnya birokrasi dengan berbagai prosedur yang harus dilalui dalam setiap keputusan yang diambil terkait pengadaan fasilitas serta biaya investasi yang minim. Peningkatan sarana dan prasarana sesuai dengan perjanjian kerjasama pengelolaan yang telah disepakati guna meminimalisir resiko yang terjadi. Pembagian hasil dibuat antara kedua belah pihak perlu diterapkan pengkajian ulang agar kedua belah pihak memahami tanggung jawab, hak serta kewajiban masing-masing sebagai pihak yang melakukan kerjasama.

Pengembangan manajemen profesional, sarana serta berbagai inovasi ide baru turut diciptakan dan dikembangkan oleh pengelola untuk mewujudkan *good governance* sebagai tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan visi meningkatkan produktivitas pangan serta kesejahteraan masyarakat. Hasil pertanian yang semakin produktif sehingga meningkatkan daya jual agar terjadi peningkatan pendapatan.

4.7 Saran Terhadap Penerapan Maupun Isi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No10/Permentan/OT.010/4/2017 dalam Mewujudkan *Good Governance*

Menurut Handayani dalam mengukur sebuah keberhasilan peraturan yakni prestasi, kepuasan dan kemampuan menyesuaikan diri. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diketahui bahwa dalam melakukan pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah lokal atau daerah dengan membuat peraturan daerah tentang mekanisme sistme pertanian yang menjadi unggulan pada tiap-tiap wilayah kemudian diatur, dikembangkan serta disesuaikan dengan kapasitas pegawai Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung. Uraian Permentan terkait dengan tugas masing-masing bagian dalam Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung menunjukkan bahwa pengembangan pegawai senantiasa dilakukan dan dioptimalkan. Pemerintah pusat mewajibkan tiap wilayah khususnya tiap wilayah kabupaten menemukan produksi hasil pertanian yang menjadi unggulan kemudian dikembangkan. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung menjelaskan bahwa dalam diungkapkan bahwa pembagian tugas ini dilakukan untuk memudahkan pemerintah pusat untuk fokus dalam menganalisa berbagai potensi yang ada dengan memberikan

kewenangan pada masing-masing pihak pada Dinas masing-masing kota agar dikembangkan dengan maksimal kemudian pihak Pemerintah pusat membantu secara global melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik sehingga memudahkan untuk proses branding atau proses pengenalan berbagai potensi dalam berbagai sektor khususnya industri pertanian. Khusus sektor pertanian berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa terdapat berbagai prestasi yang dicapai yakni dimana hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan jumlah produksi hal ini menunjukkan bahwa penerapan Permentan dalam melakukan pengembangan pegawai agar mampu melaksanakan uraian tugas serta pencapaian hasil kerja yang ditentukan berhasil untuk dilaksanakan. Berbagai usaha yang dilakukan agar hasil kerja tercapai tidak lepas dari adanya sistem kerjasama antara Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dan pihak swasta dalam memasarkan hasil pertanian menunjukkan bahwa Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung berhasil menunjukkan prestasi dengan memperkenalkan hasil pertanian pada pihak luar. Prestasi berikutnya yakni adanya perpanjangan kontrak kerjasama antara Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dengan beberapa lembaga pengembangan penelitian pertanian yang fokus pada bibit unggul serta penanaman berbagai varietas jenis tanaman pangan lain.

Saran berikutnya yakni perhatian terhadap perbaikan regulasi terkait dengan solusi hambatan proses penerapan sebuah kebijakan, proyek atau program yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dimana hal tersebut ditunjukkan dari berbagai statement dari pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung yang belum ada pihak dengan jelas

bertanggung jawab dalam mengelola bahwa kendala program sebab hal ini berkaitan dengan anggaran. Saran berikutnya perlu dikembangkan hasil pertanian dengan pemanfaatan peningkatan nilai lebih yang dimbing oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung pada petani maupun warga sekitar.

Hal berikutnya yakni terkait dengan kemampuan menyesuaikan diri para pegawai untuk mengikuti Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No10/Permentan/OT.010/4/2017 dalam mewujudkan *Good Governance*. Penerapan peraturan mekanisme sistem tentu berdampak pada perubahan baik secara psikis maupun fisik pegawai maupun kondisi lapangan. Perubahan birokrasi yang berkaitan dengan pembangunan sarana serta prasarana, kemudahan fasilitas serta akses menyebabkan adanya perubahan dimana sehingga diperlukan manajemen pengelolaan yang baik dari pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dengan pihak masyarakat setempat. Masyarakat atau petani cenderung mampu bekerjasama dengan baik dan beradaptasi dengan baik dengan berbagai perubahan terkait penerapan kebijakan pengembangan pertanian dan memahami dengan baik bahwa penerapan peraturan pengembangan mekanisme pertanian ini juga ditujukan untuk meningkatkan perekonomian warga setempat sehingga aktivitas ekonomi bertambah dengan memanfaatkan berbagai potensi pertanian khususnya pada wilayah yang ada. Kerjasama yang baik atau koordinasi dengan manajemen antara pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Proses koordinasi yang dilakukan oleh pihak pusat dan pihak lokal untuk mengatur berbagai sektor industri dimana proses pengaturan dan pengelolaan manajemen yang baik sehingga berdampak pada perencanaan yang

dilakukan oleh pihak pemerintah dengan keadaan lapangan. Berbagai sektor pertanian saat ini mulai digali potensinya untuk terus dikembangkan guna meningkatkan perekonomian warga maupun daerah. Evaluasi program maupun hasil kerja yang dilakukan oleh pegawai dikaitkan dengan keberhasilan dalam pelaksanaan *Good Governance* maupu kinerja yakni partisipasi, penerapan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi, keadilan, efektivitas, akuntabilitas, strategi visi, kuantitas kerja, kualitas kerja, ketepatan waktu, kerjasama serta keterlibatan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Analisis Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung terkait konsep rencana anggaran, kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kinerja pegawai, pendayagunaan pejabat fungsional, kegiatan kedinasan seperti penyuluhan dan penelitian pertanian dan evaluasi organisasi diterapkan dengan baik sesuai dengan peraturan serta kebijakan yang ditetapkan.
2. Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung mengembangkan sektor pertanian melalui mekanisme sistem pertanian yang dilakukan oleh pihak organisasi khususnya pegawai dalam mewujudkan *good governance* berhasil sebagai pengelola tata kelola pemerintahan dalam mencapai visi yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dikaitkan dengan aspek *good governance* dari aspek partisipasi, penerapan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi, keadilan, efektivitas, akuntabilitas dan strategi visi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

a. Institusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah membutuhkan pegawai yang profesional, disiplin, bertanggung jawab memiliki kapabilitas yang sesuai dengan kebutuhan institusi agar mampu menjalankan sistem kerja yang ditetapkan serta mampu mencapai hasil kerja yang ditentukan sesuai dengan Permentan. Berdasarkan hal tersebut, saran bagi institusi

1. Hendaknya insititusi perlu melakukan perencanaan pengembangan lokasi dengan memperhatikan dana, potensi serta pengelola SDM yang ditinjau kapasitas warga.
2. Hendaknya institusi perlu melakukan evaluasi terkait dengan informasi hasil kinerja pegawai sesuai dengan kondisi lapangan dikaitkan dengan pemenuhan aspek *good governance* sebagai bentuk dari implementasi penerapan Permentan dengan sistem tata kelola pemerintahan yang baik harus dicapai oleh pegawai pada masing-masing bagian di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung
3. Hendaknya institusi meningkatkan pelaksanaan program terkait pengembangan berbagai sarana fasilitas melihat sumber daya manusia khususnya pengelolaan pegawai sesuai kebutuhan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung.

b. Bagi Masyarakat

- a. Diharapkan masyarakat lebih memahami dan mengikuti berbagai arahan program yang diarahkan pegawai Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tana Tiduang agar membantu pemerintah dalam mengembangkan pertanian sesuai kebijakan institusi.
- b. Hendaknya masyarakat lebih memahami visi, misi dan tujuan pemerintah mengenai pengembangan pertanian sehingga mampu meningkatkan perekonomian warga sekitar sesuai dengan yang diarahkan serta disosialisasikan pegawai Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung.
- c. Hendaknya masyarakat lebih terbuka dalam menyampaikan pendapat yang bersifat solutif sesuai dengan program yang diterapkan oleh pegawai Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi, pertimbangan serta tuntutan pegawai dalam meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta penerapan keberhasilan program selanjutnya sebagai bahan informasi analisa serta pengelolaan data.

c. Bagi Peneliti Lain

Disarankan agar terdapat kelanjutan dari penelitian ini sehingga pengembangan ilmu yang dapat memberikan informasi secara lebih luas mengenai penerapan Peraturan Pemerintah terkait pengembangan mekanisasi pertanian. Peneliti selanjutnya disarankan agar lebih memperhatikan faktor lain terkait kendala pengembangan pertanian misalnya kondisi lingkungan dan

sistem kelola pemerintahan dari aspek lain. Disarankan pada peneliti selanjutnya untuk dapat mengkaitkan posisi pada pemerintah dengan masyarakat dari berbagai latar belakang budaya, status sosial ekonomi agar hasil dari penelitian lebih kompleks sehingga mampu menganalisis penerapan peraturan pemerintah mengenai pengembangan mekanisasi pertanian khususnya di Kab Tana Tidung.



DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, N. (2007). *Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Anggara, S., (2014). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arianing, E & Handewi. (2008). Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Rawan Pangan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* 239-255
- Arsyad. (2006). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi Wanita "Setia Bhakti Wanita" Surabaya. *Ekuitas Vol.10 No.3 September 2006 ISSN 1411-0393*, 356.
- Budiarto, E., & Anggraeni, D. (2003). *Pengantar Epidemiologi*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Burhan, B.(2014).Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu Sosial Lainnya.Jakarta:Kencana Prenadamedia Group
- Chreim, Samia.(2003).Postscript to Change : Survivors' Retrospective Views of Organizational Changes.*Personal Review Vo. 35 No.3 pp 315-335*
- Darmawi, Edi. (2013). Analisis Keberhasilan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, Vol 2 No.2, ISSN: 2252-5270*, 3.
- Data Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung
- Dwidjowijoto, R. N. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Effendi, B, S. (2009). Strategi Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Padi Dalam Perspektif Praktek Pertanian yang Baik (*Good Agricultural Practices*). *Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian* 65-78
- Endraswara, S. (2006). *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi dan Aplikasi*.Yogyakarta: Pustaka Widyatama
- Hall, C. S., & Lindzey, G. (2010). *Psikologi Kepribadian 2 Teori-teori Holistik (Organismik-Fenomenologis)*. Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI).
- Hamdi, M., (2014). *Kebijakan Publik : Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hamid, Abdul. (2015). Implementasi Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di

- Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. *eJournal Pemerintahan*, 3, (2) 2015: 623-635, ISSN 0000-0000, 626.
- Handari, A, W. (2012). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang*.
- Hermabin, John., Djumadi., Idris, Adam. (2014). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sendawar Kabupaten Kutai Barat. *eJournal Administrative Reform*, 2014, 2 (3): 1746-1758, ISSN 2338-7637, 1749.
- Hosio, J.E. (2007). *Kebijakan Publik dan Desentralisasi Esai-Esai Dari Sorong*. Yogyakarta: Laksbang Yogyakarta.
- Makhfudli, F. E. (2009). *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika
- Moleong, L. J. (2011). *Metologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya Offset. Bandung
- Nasrul, Wedy. (2012). Pengembangan Kelembagaan Pertanian Untuk Meningkatkan Kapasitas Petani Terhadap Pembangunan Pertanian. *Jurnal LPPM UMSB ISSN 1693-2617*
- Nurcholis.(2010).*Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*.Grasindo:Jakarta
- Payne, J. M. (2008). *Program Planning Facts*. Iowa State University of Scence and Technology.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 Tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unite Kerja Eselon IV Lingkup Dinas Pertanian Pangan dan PerikananPengembangan Mekanisasi Pertanian
- Sadra, D, K. (2011). Membangun Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Untuk Mengentaskan Petani Dari Kemiskinan. *Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian 103-117*
- Sibel & Idil.(2016).Are You Ready for the Global Change? Multicultural Personality and Readiness for Organizational Change. *Journal of Organizational Management Change Vol 29 No. 3*
- Solichin, A., W. (2012). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta

Triastuti, M. R. (2003). Rekonsiliasi Nilai Demokrasi Dan Birokrasi Dalam Proses Formulasi Kebijakan Publik. *JAP, Nomor 2 Volume 2003 Oktober 2003, ISSN 1214-7040*, 135

Wasistiono N. (2003). *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia



LAMPIRAN I

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung terkait konsep rencana anggaran?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung terkait kebutuhan pegawai?
3. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung terkait pengembangan pegawai?
4. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung terkait kesejahteraan pegawai?
5. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung terkait kinerja pegawai?
6. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung terkait pendayagunaan pejabat fungsional?
7. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung terkait kegiatan kedinasan seperti penyuluhan dan penelitian pertanian?
8. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung terkait evaluasi organisasi?
9. Bagaimana kondisi *Good Governance* Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dalam aspek partisipasi ?

10. Bagaimana kondisi *Good Governance* Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dalam aspek penerapan hukum ?
11. Bagaimana kondisi *Good Governance* Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dalam aspek transparansi ?
12. Bagaimana kondisi *Good Governance* Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dalam aspek responsivitas?
13. Bagaimana kondisi *Good Governance* Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dalam aspek orientasi ?
14. Bagaimana kondisi *Good Governance* Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dalam aspek keadilan ?
15. Bagaimana kondisi *Good Governance* Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dalam aspek efektivitas ?
16. Bagaimana kondisi *Good Governance* Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dalam aspek akuntabilitas?
17. Bagaimana kondisi *Good Governance* Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dalam aspek strategi visi ?

berdasarkan informasi tersebut kami akan menyiapkan peserta pendidikan dan latihan, menyiapkan surat tugas dan menyampaikan bahwa peserta pendidikan dan latihan harus membuat laporan keikutsertaan dan pertanggungjawaban keuangan. Sedangkan untuk pola kemitraan kami berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan, kemudian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi akan menyiapkan jadwal, kurikulum pendidikan dan latihan, narasumber/widyaswara, serta sertifikat pendidikan dan latihan, melakukan rapat koordinasi terkait pembukaan, pengisian biodata, proses pembelajaran, penutupan dan penyusunan laporan. yang menentukan jadwal pelaksanaan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Tidung Provinsi. Penyelenggara pendidikan dan latihan disini yaitu Badan Pendidikan dan latihan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan latihan, dan jika sudah terakreditasi berarti lembaga pendidikan dan latihan tersebut telah memiliki kredibilitas dalam menyelenggarakan pendidikan dan latihan baik dari segi sumber daya manusianya yaitu widyaiswara, sarana prasarana yang memadai, kurikulum yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Masalah kebijakan penyelenggara ini juga diungkapkan oleh Kepala Sub Bidang

Penyelenggara Pendidikan dan latihan :

“ Kebijakan Penyelenggara pendidikan dan latihan ini diatur dalam PP No 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dimana pendidikan dan latihan merupakan unsur penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupatn/kota, meliputi kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.”

Berdasarkan wawancara tersebut penyelenggara pendidikan dan latihan mempunyai tugas :

- a) Program Pendidikan dan latihan harus dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan dan latihan yang terakreditasi .
- b) Lembaga yang memiliki kewenangan mengakreditasi lembaga Pendidikan dan latihan adalah Lembaga Administrasi Negara sebagai Instansi Pembina Pendidikan dan latihan PNS.